

# **CATATAN MONITORING COVID-19**

*Kumpulan Tulisan yang diterbitkan IGJ secara berkala mengenai situasi krisis ditengah wabah pandemi Covid19 yang ada di Indonesia dan seluruh dunia.*

**- INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE**



## INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

*-Connecting People and Knowledge for Collective Movement*

### **CATATAN MONITORING COVID-19 IGJ**

*Kumpulan Tulisan yang diterbitkan IGJ untuk melakukan monitoring secara berkala mengenai situasi krisis ditengah wabah pandemi Covid19 yang ada di Indonesia dan seluruh dunia.*

## Daftar isi

---

<b>BAGIAN 1</b> .....	4
INDONESIA DALAM PUSARAN COVID-19	
• Problematik social distancing .....	7
• Penanganan, Momentum dan Ancaman .....	10
• Corona membawa perubahan? .....	14
<b>BAGIAN 2</b> .....	18
POST-COVID19 : PERUBAHAN GLOBAL DAN PERANG DIGITALPASCA COVID	
• China Dalam Agenda Liberalisasi Global .....	19
• Tatanan Dunia Baru Pasca Covid19 .....	22
<b>BAGIAN 3</b> .....	26
INDONESIA DALAM PUSARAN COVID-19: "PERLAWANAN BURUH TERHADAP GELOMBANG PHK MASSAL & OMNIBUS LAW"	
• Derita Buruh Ditengah Pandemi .....	27
• Mempertanyakan Keseriusan Negara Melindungi Rakyat .....	29
• Oligarki Milenial Digital: Aksi "Ambil Untung" Ditengah Pandemi .....	31
• Bangun Solidaritas Ekonomi Rakyat .....	33

<b>BAGIAN 4</b> .....	34
INDONESIA DALAM PUSARAN COVID-19: MONOPOLI PENGETAHUAN DAN AKSES PADA INOVASI KESEHATAN SERTA PEMANFAATAN BERSAMA YANG BERKEADILAN	
• Isu Ketimpangan Terhadap Akses Obat Dan Alat Kesehatan Dalam Penanganan Covid19 .....	35
• Aturan dalam Negeri yang Tumpang Tindih .....	36
• Penanganan Anggaran COVID-19 Harus Dimaksimalkan .....	37
<b>BAGIAN 5</b> .....	38
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “TANTANGAN AKSES PUBLIK ATAS VAKSIN DAN LAYANAN KESEHATAN BERKEADILAN”	
• Upaya Global Membuka Akses Vaksin Untuk Semua .....	39
• Diplomasi Vaksin: “Upaya Pengadaan Vaksin Indonesia” .....	41
• Vaksinasi, Siapa Lebih Dahulu? .....	44
<b>BAGIAN 6</b> .....	46
CERITA DARI PELOSOK NEGERI: AKSI KOLEKTIF GERAKAN SOSIAL INDONESIA MERESPON COVID19	
• Gerakan “Ayo Menanam” .....	51
• Komunitas Merespon Cepat Covid-19, Membangun Kesadaran Publik .....	51
<b>BAGIAN 7</b> .....	54
CERITA DARI PELOSOK NEGERI: “PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID19 & PEMULIHAN EKONOMI DI MASYARAKAT	
<b>BAGIAN 8</b> .....	62
KEBIJAKAN PSBB DITERAPKAN, NEGARA ABAI PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT	



SUMBER: REPRO

BAGIAN - I

# INDONESIA DALAM PUSARAN COVID-19

TERBIT :  
April 7, 2020

PENULIS :  
Olisias Gultom

## Deteksi dan penyebaran

Sejak diumumkan di Wuhan pada bulan Desember 2019, wabah Covid-19 hingga akhir Awal April 2020 (3 bulan) telah menginfeksi lebih dari 1 juta manusia di 201 negara. Angka statistik menunjukkan bahwa virus yang menyebar sangat cepat ini sekalipun dapat menyebabkan kematian dan belum ada anti virusnya, tetapi jumlah orang yang dapat sembuh cukup tinggi.

Bila dibandingkan dengan wabah jenis virus sejenis, angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 lebih rendah, 3,4% (hingga 3 Maret 2020) dibandingkan Sars (9,63 %) atau Mers (34,45%). Perbandingan ini membuat Covid-19 kelihatan tidak lebih berbahaya dibandingkan virus sejenis lainnya. Tapi pada kenyataannya, dalam 3 bulan, Covid-19 secara global telah menyebabkan 59,159 meninggal.

Membandingkan dengan virus sejenis dan dampak yang ditimbulkan seperti oleh Sars dan Mers, maka banyak negara kemudian menyadari bahwa mereka tidak cukup melakukan antisipasi ketika wabah ini mulai menginfeksi warganya. Pemerintah Indonesia pada asumsi awal melihat

bahwa sektor pariwisata akan menerima dampak paling signifikan sehinggaantisipasi lebih difokuskan pada sektor ini. Tetapi perkembangannya kemudian sangat masif.

Iran dan Eropa, khususnya Italia, telah memakan korban begitu cepat hingga jumlah kematian yang melampaui angka di Wuhan. Kebijakan melakukan lockdown kota-kota dan seluruh Italia, juga diikuti oleh kota-kota lain dan beberapa negara di Eropa membuat situasi berkembang secara berbeda dan intensif. Ketika mulai menginfeksi warga Indonesia, dengan segera angka-angka berkembang cepat. Virus yang tidak mengenal suku, agama, ras dan antar golongan ini pada faktanya menyerang siapa saja. Termasuk juga tenaga kerja produktif dari pekerja teknis hingga pengambilan keputusan. Masyarakat menengah ke atas yang memiliki akses penanganan dan perawatan kesehatan yang baik telah menjadi korban pada tahap pertama. Hal ini juga memberikan indikasi akan kemampuan dan prosedur penanganan medis yang ada di Indonesia.

Tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan pada tingkat global, pada tingkat nasional para pimpinan daerah juga seperti berlomba memperlihatkan kemampuan dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai kondisi daerah masing-masing. Tidak mudah secara awam membedakan antara gejala flu biasa dengan gejala jelas yang mengindikasikan infeksi Covid-19. Sementara kecepatan penyebaran pada sisi lain sangat cepat dan masif dari orang ke orang, sekalipun belum memperlihatkan gejala-gejala yang jelas.

Tingginya pertemuan-pertemuan nasional atau pertemuan antara pusat dan daerah memberikan kontribusi penyebaran yang tinggi di Indonesia. Serta rangkaian kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar dari berbagai daerah. Hal ini membuat penyebaran masif terjadi pada pulau-pulau di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Hingga akhir Maret 2020, lebih dari setengah propinsi di Indonesia telah memiliki warga yang positif terinfeksi. Alat pendeteksi awal yang terbatas serta membutuhkan waktu dalam proses mendeteksinya, membuat jumlah warga yang terinfeksi virus menjadi tidak diketahui dengan akurat.

Prosedur pemeriksaan infeksi Covid-19 pada prinsipnya hanya dilakukan pada orang-orang apabila telah memiliki gejala jelas. Hal ini memberikan kemungkinan telah menyebarnya virus secara tidak terdeteksi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada angka-angka yang telah diumumkan pemerintah secara resmi. Penanganan dan pendeteksian hanya pada pasien dengan gejala yang jelas tersebut membuka peluang akan terlambatnya pasien dapat

tertangani, berbeda bila pasien sejak dini telah dapat dideteksi. Hal ini juga berarti memperbesar kemungkinan tingginya angka kematian, khususnya sebagai penyakit yang belum memiliki prosedur penanganan secara jelas dan pasti. Bisa jadi hal ini menjadi sebab tingginya angka kematian di Indonesia dibandingkan jumlah orang yang sembuh, berbeda dari umumnya rasio penyembuhan yang terjadi di banyak negara terdampak lainnya. Penggunaan rapid test, walaupun masih memiliki eror yang cukup tinggi, diharapkan bisa memberikan deteksi lebih awal sehingga penanganan warga terinfeksi akan lebih bisa optimal.

Test lebih pasti akan hasil infeksi bisa diperoleh melalui Polimerase Chain Reaction (PCR) yang dilakukan dengan swab, mengambil lendir atau cairan pada hidung. Penggunaan rapid test bisa membuka peluang terjadinya

kepanikan sosial. Orang-orang yang merasa sehat dan baik baik saja bisa memberikan reaksi beragam saat menyadari dirinya telah terinfeksi dan harus mengisolir dirinya. Reaksi tiap orang terhadap dirinya dan menghadapi reaksi orang atau lingkungan sekitar dengan pemahaman yang berbeda-beda sangat mudah menimbulkan ketegangan.



SUMBER: REPRO

Situasi ini bisa menciptakan kepanikan, khususnya pada masa awal terbukanya jumlah orang terinfeksi melalui rapid test yang memberikan hasil deteksi dalam waktu relatif singkat dan masif. Kepanikan semacam ini tidak jauh berbeda seperti diperlihatkan pada reaksi masyarakat yang menolak pemakaman korban pada banyak wilayah seperti diberitakan banyak media. Penanganan tuntas wabah ini jelas tidak mudah. Penyembuhan dan penanganan secara medis, sesuai pengetahuan yang berkembang, setidaknya bisa dilakukan melalui beberapa cara. Menunggu dibuatnya anti virus, melakukan upaya penanganan dengan obat-obatan atau metoda pengobatan yang ada, atau mengandalkan antibodi yang akan dimiliki setiap manusia secara evolutif. Pilihan yang tidak mudah dan masing-masing memiliki resiko dan konsekuensi. Menunggu proses penanganan secara medis berjalan,

kondisi terus berkembang dan memberikan dampak yang semakin meluas pada hampir semua aspek.

### **Problematik social distancing**

Sesuai dengan saran WHO (World Health Organization), seperti dilakukan pada banyak negara, Indonesia juga melakukan kebijakan social distancing atau physical distancing. Kebijakan ini masih merupakan antisipasi terbaik dalam menahan penyebaran virus Covid-19. Menghentikan aktifitas sekolah dan menerapkan sekolah dari rumah menggunakan fasilitas internet menjadi pilihan alternatif, khususnya bagi kota-kota besar. Mengikuti himbauan pemerintah, bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) juga menjadi alternatif bagi banyak perusahaan, khususnya pada sektor-sektor jasa. Jelas tidak semua sektor usaha bisa melakukan hal ini seperti manufaktur, pertanian, perkembunan, pertambangan dan lain sebagainya.

Situasi ini membuat Covid-19 telah mempercepat proses pemanfaatan internet dalam berbagai bidang. Pemanfaatan belanja, bekerja, sekolah, berkunjung dan lain sebagainya secara online semakin populer. Masing-masing bidang dengan segera mulai menyusun metode kerja dan pemanfaatan fasilitas secara online pada hampir semua bidang. Semua sedang menyusun dan terus memperbaiki mekanisme kerja secara online bagi kebutuhan mereka. Berbagai aplikasi mulai dibuat untuk berbagai kebutuhan, baik dalam rangka menghadapi Covid-19 maupun kebutuhan lainnya. Perlindungan data pribadi yang lemah di Indonesia tetap menjadi persoalan dibalik percepatan pemanfaatan fasilitas online ini. RUU (Rancangan Undang-Undang) yang sedang disusun harus segera disahkan sebelum persoalan lain muncul sehubungan perlindungan data pribadi masyarakat. Berhentinya aktifitas perkantoran dan sekolah di Jakarta dan sekitarnya telah memberikan dampak langsung, khususnya para pedagang kecil dan sektor informal di kota-kota besar.

Pekerja sektor informal (74 juta) yang merupakan 57% [Biro Pusat Statistik/BPS 2019] dari seluruh pekerja di Indonesia menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan penghasilannya. Jaring pengaman sosial tidak siap dalam situasi ini karena yang disanggah melalui program Bansos (Bantuan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan) dan lainnya adalah kelompok masyarakat miskin. Kelompok pekerja informal yang rentan miskin, dan dalam situasi ini dengan segera masuk ke dalam kelompok miskin, tidak dilindungi dalam program-program semacam itu. Kesulitan mendapatkan penghasilan dan rendahnya kemampuan bertahan hidup membuat sebagian besar kelompok ini mulai bermigrasi ke daerah asal mereka masing-masing.

Himbauan pemerintah agar tidak melakukan 'pulang kampung' sulit dilakukan. Resiko perluasan penyebaran sebaliknya menjadi semakin membesar bersamaan perpindahan ini. Pemerintah daerah mulai menyiapkan antisipasi yang kelihatannya akan sulit menghadapi datangnya jutaan orang sementara tetap harus melakukan prosedur isolasi 14 hari. Ancaman perluasan Covid-19 masih akan tetap tinggi, untuk itu kesiapan fasilitas kesehatan daerah jadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Puasa dan Idul Fitri merupakan salah satu puncak konsumsi nasional termasuk momen masuknya dana dalam jumlah besar dari berbagai negara ke daerah-daerah di Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tetapi momen ini juga menjadi puncak migrasi jutaan orang dari kota dan luar negeri ke daerah-daerah di Indonesia. Bisa berubah menjadi puncak penyebaran secara masif. Kebijakan menahan laju penyebaran akan sulit dilakukan, sebaliknya kemampuan daya beli atau konsumsi terkendala situasi terhentinya aktifitas perekonomian. Situasi dilematis ini membuat keputusan pemerintah menjadi tidak mudah, begitu juga dengan dampak yang dirasakan masyarakat.

Pilihan lock down atau karantina total kota-kota atau negara secara keseluruhan menjadi tidak mudah. Dampak ekonomi yang segera dilanjutkan dengan reaksi sosial akan memberikan gonjangan yang semakin sulit dikendalikan. Pada sisi lain kemampuan negara cukup terbatas untuk menanggung beban ekonomi masyarakat secara langsung seperti negara lain. Amerika dikabarkan akan memberikan insentif kepada rakyatnya, Inggris juga akan menanggung sebagian gaji karyawan yang terdampak. Hal yang sulit dilakukan pemerintah Indonesia. Keputusan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pihan moderat yang tetap saja akan memberikan dampak yang tidak mudah bagi masyarakat.

Kebijakan karantina terbatas dengan himbauan *WFH (Work From Home)* tidak bisa dilakukan oleh manufaktur. Banyak pabrik masih menjalankan produksinya dan mempekerjakan buruhnya dan para pekerja tidak dilengkapi alat pelindung diri seperti masker atau prosedur pengamanan yang ketat. Terdapat pabrik yang telah melakukan 'lockdown' pabrik dan tidak membayar gaji para buruh. Tidak adanya ketentuan yang tegas atau pemaksa dari pemerintah membuat para pekerja akhirnya harus memperjuangkan sendiri tuntutan fasilitas pelindung diri hingga melakukan negosiasi terhadap ketentuan pemotongan gaji.

Banyak perusahaan juga memanfaatkan situasi untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan alasan yang sesungguhnya berbeda dan sebaliknya meminta insentif kepada pemerintah. Tetapi terdapat juga pabrik ekportir yang telah menutup produksinya akibat tidak adanya order.

Manufaktur mungkin ditahun ini tidak melakukan PHK tetapi membayar setengah gaji atau memberikan cuti tanpa dibayar. Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, situasi seperti ini bisa dimanfaatkan pengusaha dalam rangka melakukan restruktur hutang sehingga menetapkan status pailit pada perusahaan. Pada situasi ini, kembali buruh akan menjadi korban. Berkembangnya narasi lock down dan darurat sipil memberikan reaksi berlebih masyarakat secara luas. Himbauan social distancing pada banyak wilayah telah berkembang pada tindakan melakukan lock down lokal secara sukarela pada wilayah mereka masing-masing.

Masyarakat mulai memblokir wilayah atau perkampungan mereka agar tidak dimasuki atau dilintasi warga lainnya. Bahkan pada beberapa wilayah dilakukan pencatatan detail bagi warganya apabila keluar pemukiman dan melaporkan kepada siapa saja mereka bertemu. Situasi yang jauh lebih mendekati darurat sipil ini pada dasarnya akan sulit bertahan

mengingat daya tahan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Bila berlangsung lebih lama dan tanpa kontrol atau kordinasi dengan aparaturnegara, situasi ini berpeluang menciptakan kekacauan sipil. Pemberlakuan isolasi mandiri dan pembatasan aktifitas ekonomi menjelang puasa dan lebaran akan membuka ancaman terhadap kesediaan pangan secara nasional. Kapasitas cadangan dan daya tahan di kota-kota cenderung lebih rendah daripada di daerah atau desa-desa.

Produksi di daerah berpeluang terhenti atau setidaknya terganggu dan hal ini membuka peluang terjadinya krisis pangan. Pilihan impor pada sisi lain menjadi alternatif yang tidak mudah mengingat negara-negara importir juga menghadapi situasi yang hampir sama. Mereka cenderung akan menahan ekspor pangan mereka dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan nasional masing-masing. Alternatif lain dalam menghadapi potensi krisis pangan harus menjadi perhatian pemerintah mengingat situasi ini belum jelas akan berlangsung berapa lama. Secara finansial daya tahan keuangan Indonesia juga mendapatkan ancaman. Kurs 20.000 rupiah per USD, berdasarkan perhitungan banyak ahli, merupakan ambang batas kemampuan perbankan untuk bisa menjaga likuiditasnya agar tidak terjadi gagal bayar. Sementara hingga pertengahan Maret 2020 nilai kurs rupiah sempat mencapai 17.000 rupiah/USD. Seberapa kuat Bank Indonesia



SUMBER: SHUTTERSTOCK

akan mampu menjaga likuiditas perbankan? Bilamana situasi berkembang diluar kendali atau berjalan lebih lama maka skenario masuknya dana IMF jelas akan menjadi harapan dalam menghadapi situasi ini. Menteri Keuangan memperkirakan situasi terburuk pertumbuhan Indonesia bisa mencapai minus 0,4%.

### Penanganan, Momentum dan Ancaman

Pada tanggal 27 Maret 2020 IMF (International Monetary Fund) resmi menyatakan dunia telah memasuki resesi ekonomi secara global. Setidaknya 80 negara telah mengajukan permintaan bantuan kepada IMF dan G20 menghitung kebutuhan sekitar 5 triliun USD atau 6% dari GDP global bahkan lebih. Situasi ini menunjukkan jelas dampak wabah ini sangat besar bahkan diperkirakan akan lebih besar dari krisis ekonomi global sebelumnya.



SUMBER: SINDONEWS.COM

Mengandalkan IMF dalam kondisi permintaan yang sama dari banyak negara juga menjadi pilihan yang tidak mudah dan mengandung risikonya sendiri. Kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi Covid-19 dengan memberikan stimulus ekonomi pertama (I) pada akhir Pebruari 2020 yang dititikberatkan pada sektor pariwisata berlalu begitu cepat akibat asumsi-asumsi yang terlalu optimis sehingga harus ditunda pelaksanaannya serta dirubah secara signifikan. Revisi berikutnya dilakukan stimulus II pada minggu kedua Maret 2020 yang mulai menyinggung soal ketahanan pangan dan bahan baku impor untuk industri.

Pada awal April 2020, bersamaan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), pemerintah menyiapkan dana menghadapi Covid-19 sebesar Rp. 405,1 triliun. Dana tersebut diperuntukan untuk Kesehatan Rp. 75 triliun, Jaring Pengaman Sosial Rp. 110 triliun, Insentif pajak & KUR Rp. 70.1 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional Rp. 150 triliun. Situasi yang berkembang cepat membuat keputusan juga dilakukan cengan cepat bahkan melebihi kesiapan pelaksanaan di lapangan. Misalnya pada pernyataan presiden tentang penangguhan hutang atau cicilan setahun bagi kredit kendaraan bermotor. Pada pelaksanaannya pihak leasing belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut serta bagaimana

tatalaksananya, akibatnya terjadi gesekan antara leasing, pihak ketiga dan masyarakat. Persoalan semacam ini berpotensi muncul pada banyak kasus lainnya, khususnya terkait persoalan perbankan dan finansial, dimana tatalaksana yang tidak siap, lemahnya pengawasan, moral hazard, dan lainnya dan semuanya memanfaatkan isu Covid-19. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah mengeluarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), terkait penangguhan cicilan dan bunga hutang khususnya untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi OJK tidak menetapkan batasan-batasan tertentu dan memberikan keleluasaan kepada pihak bank dalam memberikan keringanan cicilannya. OJK yang cenderung lepas tangan bisa menyebabkan akan 'meledaknya' NPL (*Non Performance Loan*) bank misalnya bila mereka melakukan penangguhan selama setahun kepada KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Belajar dari pengalaman tahun 1998 atau BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), dikuatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dengan melakukan modifikasi laporan keuangannya sehingga terlihat bermasalah sehingga bisa meminta atau mendapatkan fasilitas-fasilitas kemudahan. Pengalaman masa lalu menunjukkan pola bermain umumnya dilakukan pada pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pihak perbankan. Pemerintah cukup jelas menyakinkan bahwa situasi darurat dan ancaman krisis multidimensi berpeluang terjadi dalam waktu dekat. Berbagai kebutuhan seperti pangan dan bahan baku industri perlu dijaga melalui impor. Selain hal tersebut mengandung ketidakpastian akibat negara eksportir juga berpeluang menahan komoditinya, situasi ini juga sangat mudah dimanfaatkan pengusaha importir nasional. gejala ke arah tersebut mulai 'tercium', belum agi wabah memasuki puncaknya, beberapa komoditi seperti gula sudah mulai langka dipasaran.

Pengusaha importir beras, gula, garam dan beberapa komoditi lain yang selama ini menjadi polemik mendapatkan peluang untuk memanfaatkan situasi ini demi kepentingan bisnis dan kelompoknya. Ketegasan dan kecermatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi ini. Tetapi pada kenyataannya agenda-agenda ekonomi dan politik tertentu masih menjadi pilihan yang mendapatkan pertanyaan publik. Agenda pemerintah melakukan perubahan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk disesuaikan dengan perkembangan kondisi akibat Covid-19, walaupun tetap harus dicermati, hal ini masih dapat dipahami. Tetapi pemaksaan penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mengandung kontroversi dan berimplikasi multi aspek dan multi dimensi, akibat berhubungan dengan banyak sektor dan perundangan, sepertinya mengundang pertanyaan besar.

## STIMULUS I DAN II

Dalam rangka mengurangi dampak Covid-19 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan berupa stimulus kepada masyarakat dan pelaku industri pada akhir Februari 2020. Stimulus fiskal dan non fiskal yang dikeluarkan pemerintah melalui insentif kepada badan usaha bertujuan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

- Percepat penyaluran dana melalui Kartu Pra Kerja, di prioritaskan 3 propinsi;
- Menambah insentif program Kartu Sembako selama 6 bulan;
- Menambah subsidi bunga dan uang muka perumahan, 175.000 unit rumah baru layak huni;
- Insentif industri pariwisata pada 10 destinasi wisata, diskon penerbangan. Anggaran bagi influencer dan media sosial sebesar 72 miliar dan alokasi ini menimbulkan kritik berbagai kalangan;
- Memberikan stimulus diskon penerbangan hingga 20% selama 3 bulan bagi 10 destinasi wisata;
- Memberikan diskon avtur selama 3 bulan;
- Realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan infrastruktur di 10 Destinasi Wisata;
- Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran di 10 Destinasi Wisata Prioritas.

Stimulus kedua dikeluarkan pada minggu kedua Maret 2020. Total stimulus kedua sebesar Rp 22,9 triliun dan stimulus pertama sebesar Rp. 10,3 triliun. Paket stimulus kedua terdiri dari stimulus fiskal, stimulus non-fiskal, dan stimulus sektor keuangan.

### STIMULUS SEKTOR FISKAL

- Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pekerja manufaktur selama 6 bulan;
- Relaksasi PPh pasal 22 Impor selama 6 bulan untuk sektor 19 sektor tertentu;
- pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan untuk 19 sektor tertentu;
- Relaksasi restitusi PPN yang dipercepat selama 6 bulan untuk 19 sektor tertentu.

### STIMULUS SEKTOR NON-FISKAL

- Penyederhanaan/pengurangan Lartas (larangan terbatas) ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing produk ekspor;

- Penyederhanaan/pengurangan Lartas impor untuk meningkatkan impor bahan baku;
- Percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Trader kepada 625 perusahaan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dan 109 perusahaan *Authorized Economic Operator* (AEO);
- Percepatan proses ekspor-impor melalui *National Logistics Ecosystem*.

#### **STIMULUS PEREKONOMIAN**

- Mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan;
- Menjaga stabilitas sistem keuangan;
- Mendukung pertumbuhan ekonomi terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selanjutnya pada 31 Maret 2020 pemerintah bersamaan dengan menerbitkan Perppu No.1/2020 kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mengatasi Covid-19, dengan menggunakan sumber keuangan negara, mengeluarkan dana sebesar Rp 405,1 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa sektor.

- Perlindungan Sosial (Rp. 110 triliun)
- Kesehatan (Rp. 75 triliun)
- Program Pemulihan Ekonomi (150 triliun)
- Insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat/KUR (70.1 triliun)

Upaya menarik investasi dengan melakukan deregulasi melalui omnibus law terus dipaksakan oleh pemerintah pada saat dunia sedang mengalami perlambatan, termasuk perlambatan arus investasi.

Keputusan melakukan percepatan pada saat yang tidak tepat dan ancaman krisis menjadi keputusan yang layak dipertanyakan. Jangan sampai kasus BLBI kembali terjadi. Alasan investasi sepertinya tidak menjadi alasan utama tetap dipaksakannya omnibus law untuk diundangkan. Pada kluster pangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat perubahan dimana impor pangan disamakan dengan produksi dan cadangan nasional. Hal ini berarti aturan impor yang sebelumnya hanya bisa dilakukan apabila produksi dan cadangan nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri tidak lagi berlaku. Ancaman krisis akibat Covid-19 menjadi alasan digunakannya omnibus law sebagai payung hukum agar leluasa melakukan impor. Mekanisme hukum lain seperti Perppu yang bisa dilakukan tidak menjadi pilihan pemerintah saat ini.

Sementara melalui omnibus law Cipta Kerja ini persoalan lain yang masih menjadi polemik akan ikut disahkan. Misalnya soal kemudahan ijin lingkungan bagi investor, tenaga kerja murah, liberalisasi Tenaga Kerja Asing untuk start up dan kemudahan lainnya khususnya bagi investasi asing. RUU ini juga mengurangi sanksi terhadap monopoli dimana hal ini memberikan peluang bagi kelompok-kelompok pengusaha nasional tertentu untuk memperluas produksinya sehingga tidak menghambat ekspansi monopolinya. Begitu juga persoalan lain yang menjadi kritik berbagai kelompok masyarakat. Pemaksaan dan percepatan diundangkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang memang telah dipersiapkan sebelum situasi krisis, akhirnya lebih dilihat sebagai pemanfaatan momentum ketimbang menjadi alat dalam menghadapi ancaman serius Covid-19.

Covid-19 telah membawa Indonesia memasuki krisis multidimensi, yang berpeluang jauh lebih besar dari krisis ekonomi global tahun 2008 atau bahkan dari krisis Asia tahun 1998. Krisis moneter tahun 1998 umumnya terjadi di kota-kota besar. Sebaliknya di desa-desa yang mengandalkan perkebunan dan pertanian tidak mengalami situasi krisis sehebat di perkotaan. Mereka masih bisa melakukan produksi dan menjaga daya hidup mereka. Tetapi situasi saat ini mengancam setiap orang hingga ke desa-desa sehingga mereka tidak lagi bisa beraktifitas dan memproduksi. Akibatnya mengancam produksi secara nasional. Hal ini tentunya membuka peluang terjadinya krisis terhadap daya hidup.

Pengalaman Indonesia menghadapi krisis selalu dibarengi dengan kontroversi kebijakan dan moral hazard yang memanfaatkan situasi dan mengorbankan negara dan masyarakat. Kasus BLBI yang tidak mendapatkan penyelesaian sejak krisis 1998. Kasus Century yang juga tidak mendapatkan kejelasan sejak krisis 2008. Saat ini, lahirnya Perpu No.1/2020, yang kontroversi akibat berisi pasal yang membebaskan KSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) dan jajarannya dari peluang tuntutan pidana dan perdana kembali menjadi pertanyaan besar. Bayang-bayang Kasus BLBI dan Kasus Century kembali menghantui masyarakat, sebagai kelompok yang akan menanggung akibatnya.

### **Corona membawa perubahan?**

Krisis moneter 1998 hanya terjadi di Asia, khususnya Asia Tenggara, tetapi krisis kali ini terjadi secara global. Semua negara di dunia terancam oleh Covid-19. Negara-negara maju di Utara hampir semua sedang kewalahan perkembangan penyebaran infeksi dan penanganan yang seperti tanpa henti. Setiap hari dilaporkan ratusan orang meninggal dan ribuan orang baru terinfeksi. Rumah sakit tidak pernah cukup begitu juga peralatan medis yang dibutuhkan. Pabrik-

pabrik berubah fungsi membuat kebutuhan medis dan apa saja yang dibutuhkan. Aktifitas perekonomian lumpuh, pasar saham dimana-mana runtuh. Sebagian negara-negara di dunia sedang sibuk dan panik, sebagian lagi sedang bersiap-siap bilamana datang.

Suasana saat ini seperti sedang menghadapi perang dunia. Perang Dunia Ketiga, perang melawan virus. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan telah berada pada minus sampai 1 %. Bank sentral Amerika mengeluarkan ratusan milyar dollar ke pasar keuangan sebagai bentuk kuantitatif easing, pembeli surat hutang pemerintah Amerika. Ini biasa dilakukan bank sentral Amerika apabila memasuki situasi krisis seperti tahun 2008-2009. Pemerintah Amerika mengeluarkan stimulus 2 triliun USD, terbesar dalam sejarah USA, dimana akan memberikan insentif 1200 USD bagi orang dewasa dan 500 USD bagi anak. Negara kapitalis yang liberal ini sedang bertindak menjaga universal basic income, menjaga daya beli dengan membagikan cash kepada penduduknya. Mungkin ini kali pertama dalam sejarah Amerika Serikat.

**Apakah Amerika akan berubah?** Tidak mudah menyimpulkan hal tersebut mengingat adanya situasi Pemilu di dalam negeri. Apakah langkah Trump mengambil kebijakan yang mirip kampanye Bernie Sanders saingan terberatnya sekaligus dalam rangka menarik simpati? Tapi apapun itu, Trump telah memperlihatkan perubahan wajah kapitalis Amerika. Setelah kebijakan ala proteksionisnya, kali ini mengambil kebijakan gaya sosialis, mencuri materi kampanye demokrat kiri Amerika. Kebijakan Boris Johnson di Inggris yang akan menanggung 80% gaji para pekerja, memperlihatkan wajah kapitalis yang tidak jauh berbeda dan keduanya dilakukan oleh kelompok kanan di negaranya masing-masing, konservatif maupun republik.

Melihat apa yang sedang berkembang secara global sejak sebelum hingga datangnya wabah, kemana arah globalisasi akan berubah? Apakah sedang terjadi Hybrid Kapitalisme? Atau kapitalisme sedang menunjukkan elastisitasnya dalam mempertahankan diri dari keambrokan dan keruntuhan? Apapun itu, Covid-19 telah menjadi katalisator yang mempercepat terjadinya proses perubahan global. Tinggal bagaimana selanjutnya setiap komponen memanfaatkan ini sebagai momentum dalam memperbaiki bumi, manusia dan interaksi diantara keduanya. Covid-19 terjadi ditengah kapitalisme yang sedang memasuki krisis, dimana perang dagang terbuka sedang terjadi antara Amerika Serikat dengan China. Perkembangan perekonomian China telah membuat kutub dunia mengalami pergeseran dan mendorong terjadinya perang dagang secara terbuka, melanggar aturan-aturan yang telah disepakati puluhan tahun.

Wabah Covid-19 kemudian menguji daya tahan setiap negara dan bagaimana menjaga perekonomiannya. Ketika wabah nantinya surut, maka 'kutub-kutub' baru dunia bisa jadi akan terlihat semakin jelas.

Covid-19 datang ditengah semakin gencarnya kampanye perubahan iklim di dunia, khususnya di Eropa. Teringat kisah seorang gadis remaja, Greta Thunberg, yang memulai aksi perubahan iklim dari palemen di negaranya Swedia, hingga menjadi gelombang protes para remaja di seluruh Eropa hingga belahan dunia lainnya. Pesan generasi muda kepada generasi tua, para pemimpin dan pengendali kekuasaan yang terlalu lemah dalam kooptasi cengkraman rejim kapitalis minyak. Alam, dimana lingkungan dan iklim, cenderung dilupakan, disepelekan dan hanya menjadi lips service atau bahkan menjadi alat untuk mendominasi semata, saat ini telah merestui virus corona menjadi wabah bagi manusia secara global. Melalui Covid-19, alam memberikan pesan yang jelas atas perubahan-perubahan didalamnya yang menuntut keseimbangan baru bagi alam. Agar alam, lingkungan dan iklim kembali menjadi perhatian penting dan utama dalam pembangunan dan kebijakan global. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, gelombang alam pasti akan datang!

Covid-19 saat digitalisasi mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Percepatan digitalisasi pada hampir semua bidang dan kebutuhan, secara perlahan mulai memperlihatkan bentuk struktur relasi industrial dan sosial baru pada masyarakat. Bagaimana interaksi dalam bekerja hingga interaksi sosial sedang mneyusun bentuknya yang baru. Umumnya anak-anak yang sebelumnya sudah terbiasa dalam aktifitas digital terlihat lebih mampu mengadapi situasi keterasingan sosial baru berfasilitas digital ini.

Covid-19 datang disaat pemerintah sedang gencarnya mengundang investasi masuk ke Indonesia. Segala upaya telah dilakukan, menyediakan infrastruktur dan kini melakukan percepatan deregulasi, merubah UU (Undang-Undang) hasil kesepakatan rakyat. Liberalisasi sejak 1998 telah mendapatkan perlawanan yang jelas dari rakyat, setidaknya terlihat dari penolakan setiap UU yang bertentangan dengan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi. Kepentingan kapitalis global pada banyak sisi jelas bertentangan dengan kepentingan rakyat, dimana hal tersebut pada perspektif sejarah sebaliknya telah melahirkan kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara.

Pemerintah yang dipilih rakyat dan sebagai pengabdianya terhadap rakyat, sudah selayaknya berada pada sisi rakyat bukan sebaliknya mengakali rakyat. Pengalaman Indonesia sejak tahun 1998 yang melayani permintaan atas nama investasi, memperlihatkan bukan hanya tidak kunjung datangnya investasi

seperti yang diharapkan, melainkan semakin tergantungnya Indonesia dari investasi global. Pada dasarnya proses tuntutan dan pemenuhan tersebut hanya akan merubah negara dan bangsa ini sebagai wadah dalam rangka melayani kepentingan kapital global, jauh dari cita-cita bangsa ini memerdekakan diri.

Covid-19 memberi pelajaran bagaimana ketamakan atas keuntungan yang telah merusak alam, menelantarkan lingkungan, merubah iklim kini mengembalikan dampaknya kepada kita. Ekonomi dengan mengandalkan konsumsi hanya dalam hitungan bulan telah porak poranda. Ekonomi dengan mengandalkan infrastruktur semata tidak mampu bertahan dan melakukan fungsinya. Investasi seperti apa yang hendak dicari? Investasi yang dengan mudah melarikan diri? Investasi yang tidak bertanggungjawab terhadap pekerja? Investasi yang tidak peduli akan kerusakan lingkungan dan hanya pada keuntungan semata? Investasi yang hendak menganbil alih dan menguasai aset rakyat?

Menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada porsinya harus menjadi perhatian utama. Mengembalikan pelayanan publik sebagaimana layaknya rakyat ditempatkan dan dilayani harus segera dilakukan. Membangun produksi berdasarkan kerakyatan dan solidaritas sosial akan menjadi dasar yang kuat bagi bangsa dan kemanusiaan. Membangun negara yang mampu memenuhi kebutuhan negerinya dan membangun produksi yang khas, selayaknya menjadi dasar bagaimana perdagangan dunia dilakukan dalam penghargaan dan kesederajatan yang sama antar negara. Maka perdamaian dunia, antara negara dengan negara, bangsa dengan bangsa, manusia dengan alam menjadi keniscayaan. Sebuah harapan, ketika masyarakat bergotong royong memproduksi kekurangan peralatan medis, melakukan pembersihan lingkungan, membangun organisasi warga dalam menjaga wilayahnya dan aktifitas solidaritas lainnya.

Usaha kecil menengah berubah memproduksi bermacam kebutuhan lain. Pada skala global beberapa pabrik juga mulai merubah produksi mereka memenuhi kekurangan peralatan medis, tidak hanya bagi negaranya, tetapi juga bagi negara lainnya. Produksi kerakyatan dan solidaritas sosial kembali mengambil peran nyatanya sebagai kekuatan yang sesungguhnya dari produksi dan pemenuhan kebutuhan. Solidaritas sosial, solidaritas kemanusiaan dalam kegotong royongan menjadi kekuatan utama sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai manusia dalam menghadapi persoalan bersama.





SUMBER: Max-o-matic.POLITICO.EU

BAGIAN - II

## POST-COVID19 : PERUBAHAN GLOBAL DAN PERANG DIGITALPASCA COVID

TERBIT :  
September 14, 2020

PENULIS :  
Olisias Gultom

Setelah perang dunia kedua berakhir, segera negara-negara pemenang perang menyusun tatanan dunia yang baru. Mengikuti kemudian lahirnya lembaga-lembaga seperti PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), World Bank, IMF (*International Monetary Bank*) dan termasuk lahirnya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Orde baru dunia dengan agenda liberalisasi mulai berlangsung dan dijalankan secara sistematis sejak saat itu. Menghindariterjadinya perang massal secara terbuka seperti perang dunia kedua menjadi alasan dibangunnya tatanan dunia yang baru. Tatanan yang didasarkan pada kekuatan kapital dan dibangun secara sistematis dan global.

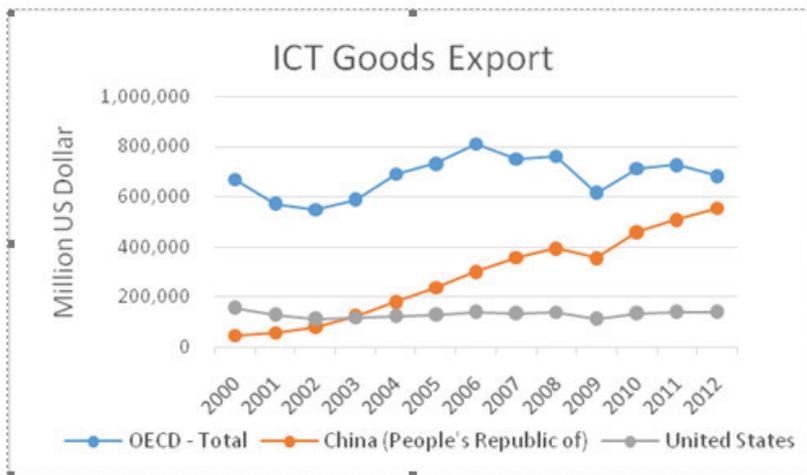
Pertentangan segera muncul tidak lama setelah masa pembentukan tatanan dunia baru tersebut. Situasi berkembang dengan menguatnya Blok Barat dan Blok Timur. Ketegangan politik terjadi berbasis pertarungan liberalisasi pasarmelawan pasar yang terkontrol menjadi dua kutub yang menguat. 'Perang dingin' selama kurang lebih 40 tahun barumereda setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1988. Perubahan ini membuka seluas-luasnya kesempatan bagi rejim pasar bebas menyusun infrastruktur ekonomi neo liberal

secara global. Mengikuti terbentuknya organisasi keuangan internasional, tahun 1947 lahir sebuah kesepakatan pembebasan tarif terhadap barang-barang perdagangan atau dikenal dengan GATT. GATT terus berjalan dan berkembang, negara yang terlibat perlahan namun terus bertambah. Perluasan anggota dan konsekuensi perdagangannya membuat pengaruh GATT menjadi semakin luas dan mendalam secara global.

Melalui Putaran Uruguay yang dimulai tahun 1986, GATT akhirnya resmi menjadi WTO (*World Trade Organization*) dengan pemberlakuan aturan perdagangan pada Januari 1995. Organisasi yang saat berdiri terdiri dari 123 negara ini bertujuan utama melakukan liberalisasi perdagangan dunia. Sejak Putaran Uruguay, persoalan yang diatur tidak lagi hanya sebatas penurunan tarif atas barang perdagangan, tetapi semakin meluas pada persoalan jasa dan kekayaan intelektual.

### China Dalam Agenda Liberalisasi Global

Republik Rakyat Cina (RRC) yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua telah memperlihatkan perkembangan ekonomi yang pesat dengan kekuatan populasinya yang sangat besar. Salah satu negara penandatangan awal GATT ini sempat mengkritik GATT secara keras, akhirnya melakukan perubahan strategi



ekonominya secara unik. Keputusan mengadopsi ekonomi pasar dengan tetap dipimpin oleh sebuah Partai Komunis yang tersentral akhirnya membuat RRC mengajukan kembali keanggotaannya dalam organisasi WTO. Setelah menunggu 15 tahun akhirnya pada tahun 2001 China resmi menjadi anggota WTO dimana sebelumnya terlebih dahulu melakukan rangkaian kesepakatan dagang dengan AS (Amerika Serikat).

Sebelum bergabung dengan WTO ekonomi RRC sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang pesat. Mengimbangi kapasitas produksi yang besar dan terus meningkat RRC membutuhkan pasar yang lebih luas. Pangsa pasar elektronik RRC di AS telah meningkat pesat dari 9,5 % pada tahun 1992 menjadi 21,8 % pada tahun 1999. Kontribusi produk komputer dari RRC juga naik dari 4 % pada tahun 1996 menjadi 21 % pada tahun 2000 untuk pasar dunia. Produk harddisk dari RRC untuk pasar global meningkat dari 1 % pada tahun 1996 menjadi 6 % pada tahun 2000. Umumnya negara-negara anggota WTO, khususnya negara berkembang, berharap melalui WTO mereka berpeluang memperbaiki perekonomian mereka. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang diterapkan WTO sebaliknya malah memberikan beban dan menyulitkan bagi banyak negara berkembang dalam seperti dalam melakukan ekspor hasil produksi mereka. Aturan dan pola pengambilan keputusan WTO juga cenderung lebih berpihak pada negara-negara maju. Situasi ini akhirnya membuat WTO lebih menjadi 'kontrol' bagi perdagangan dunia ketimbang 'kesempatan' yang adil bagi negara-negara di dunia.

RRC dalam prosesnya memperlihatkan hal yang sedikit berbeda. Setelah bergabung dengan WTO, segera produksi RRC mengisi pasar dunia dengan leluasa, setidaknya mampu membanjiri banyak negara-negara berkembang. Perlahan tapi pasti mulai menggeser banyak produk-produk yang selama ini didominasi negara-negara maju. Laporan beberapa survei dan riset memperlihatkan para pelaku ekonomi di Eropa dan Amerika akhirnya merasakan tekanan negatif setelah RRC bergabung di WTO.

Setelah WTO berdiri pada tahun 1995, proses globalisasi mulai menguat secara sistematis. Kekuatan kapital global semakin menancapkan pengaruhnya di banyak tempat dan bidang. Globalisasi memperkuat semua negara untuk tunduk dalam aturan perdagangan dan hukum ekonomi kapital secara global. Paramater pasar dan finansial menjadi ukuran ketat yang harus dipenuhi setiap negara. Dominasi kapital yang terjadi secara global berkembang seperti tanpa lawan dan menysisakan lawan hanya pada dirinya sendiri, krisis.

Krisis 2008 telah memukul rejim kapital global secara keras yang memukul Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Beberapa negara Eropa bahkan mengalami kebangkrutan ekonomi. Peralihan modal dan penguasaan yang mengikutinya menjadi konsekuensi yang harus terjadi. Pada situasi tersebut ekonomi Jerman yang telah tumbuh pesat semakin menguat di Uni Eropa. Jerman sendiri telah tumbuh tumbuh menjadi negara penting secara ekonomi di Eropa.

Jerman setelah kehancurannya pasca perang dunia kedua dan dinamika politik, reunifikasi sejalan bubarnya Uni Soviet, berhasil tumbuh memperkuat perekonomiannya. Industri Jerman mengambil posisi penting dalam perdagangan global. Sebaliknya Jepang pasca kehancuran pada perang dunia kedua telah berhasil tumbuh dan menjadi salah satu kekuatan penting secara ekonomi di Asia. Berbeda dengan Jerman, Jepang mengalami kesulitan dalam menghadapi konsekuensi menjalankan ekonominya dalam arus rejim kapital global. Jepang masih menghadapi persoalan ekonomi, terlebih pasca krisis 2008.

Sebaliknya, Ekonomi RRC yang tengah tumbuh pesat dan produksi China yang semakin mendominasi perdagangan dunia segera menjadi kekuatan ekonomi baru yang berpengaruh secara global. Krisis ekonomi 2008 menjadi momentum penting bagaimana China menjadi aktor penting dalam Global Supply Chain. Peralihan produksi dari banyak negara (AS dan Uni Eropa) ke China menjadi wajah penting bagaimana proses peralihan produksi dunia beralih ke China.

Produksi ICT (Information Communication Technology) dan produk lain khususnya berbahan rare earth semakin mendominasi dunia. China diperkirakan menguasai 97% bahan rare earth dunia. Bahan penting bagi peralatan modern seperti elektronik maupun peralatan modern lainnya termasuk teknologi pertahanan. Rare earth juga merupakan bahan kunci bagi teknologi ramah lingkungan seperti turbin angin dan teknologi sejenis lainnya, dimana perkembangan teknologi alternatif modern kini sedang berkembang ke arah tersebut.

Pada tahun 2013, mengikuti perkembangan ekonominya, RRC memunculkan inisiatif One Belt One Road (OBOR) atau yang juga dikenal dengan Belt Road Initiative (BRI). Program pembangunan infrastruktur darat dan laut paling ambisius pada masa kini. Gagasan yang menghubungkan infrastruktur dan relasi ekonomi hampir 2/3 dunia. Tidak terbatas pada infrastruktur transportasi dan pendukungnya, tetapi juga infrastruktur telekomunikasi dan fasilitas digital yang sebelumnya telah juga berkembang. Jaringan transportasi darat, laut dan 'udara' melingkupi wilayah yang begitu luas. Sisi utara dan barat melintasi Asia Barat hingga ke Eropa, sisi timur melalui Asia Timur hingga Pasifik, sisi selatan melingkupi sebagian besar Afrika dan menembus hingga Amerika bagian selatan.

Perkembangan RRC tidak sebatas perdagangan barang semata, kekuatan finansial China juga mulai memperlihatkan pengaruh dan kekuatannya secara

global. Sejalan gagasan OBOR/BRI, pasca krisis 2008 yang berkepanjangan, China juga melakukan inisiatif mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Lembaga keuangan yang terdiri dari negara-negara Asia dan Eropa. Sebuah lembaga finansial yang mengimbangi ADB (19866) yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Jepang dimana masing-masing memiliki share sebesar 15,7%. Hal ini menunjukkan niat China dalam mengambil peran penting dalam ekonomi global, setidaknya dari wilayah Asia dan Pasific.

Krisis ekonomi 2008 telah menunjukkan bagaimana China dapat dengan lebih cepat memulihkan ekonominya bahkan mendapatkan penguatan dari situasi krisis tersebut. Setelah memperlihatkan bagaimana produksi China menguasai pasar global, fase selanjutnya mendorong terbangunnya infrastruktur transportasi global dan dilanjutkan pada sektor finansial. Penguatan secara global ini telah menempatkan China pada posisi penting dalam perekonomian global. Perubahan peta kekuatan ekonomi global mulai mengalami pergeseran dengan beberapa pelemahan pada negara maju dan penguatan pada negara-negara berkembang. Situasi ini terwakilkan melalui 'perang ekonomi' yang terjadi antara AS dan RRC.

### **Tatanan Dunia Baru Pasca Covid19**

Pada situasi memanasnya perang ekonomi antara AS dan RRC serta anjloknya harga minyak dunia dan perkembangan ekonomi global yang kian memasuki krisis baru, muncul pandemi Covid-19. Kebijakan lock down yang dilakukan hampir di seluruh negara dunia telah memberikan tekanan ekonomi yang sangat kuat dan mendalam dengan seketika. Pukulan ekonomi terjadi merata secara global, setidaknya dalam beberapa bulan pertama pandemi merebak.

Vaksin Covid-19 yang sudah mulai memasuki fase produksi telah memberikan harapan akan segera pulihnya keadaan dalam waktu yang tidak lama lagi. Artinya kondisi akan segera pulih, tetapi tentunya dengan situasi yang tidak sama persis seperti sebelum krisis. Negara yang lebih cepat mengatasi keadaan pandemi dan mengembalikan aktifitas ekonominya akan berpeluang mendapatkan keuntungan dan penguatan bagi perekonomiannya. Bagi-negara-negara dengan potensi dan kapasitas yang signifikan hal itu menjadi kesempatan menjadi lebih 'kuat'

Bagaimana situasi peta kekuatan ekonomi global pasca Covid-19? seperti krisis 2008 apakah RRC akan mendapatkan momentum baru yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka? Ataupun rejim kapital global yang akan mendapatkan momentum dalam mengembalikan kekuatan dan 'kendali permainan' kepada

mereka? Ataukah situasi ini akan memunculkan peta kekuatan ekonomi global yang benar-benar baru? Melahirkan gagasan baru untuk bentuk ekonomi global baru?

Apapun itu, digitalisasi akan menjadi faktor penting dalam perkembangan perekonomian global kedepan. Hal ini terlihat dari banyaknya bidang dan sektor telah semakin mendalam mengalami proses digitalisasi. Kebijakan lock down secara global saat pandemi juga telah memberikan pelajaran penting bagaimana mekanisme digital mengambil peran penting dengan potensi yang semakin dikembangkan.

Bisnis berfasilitas layanan digital jelas akan memiliki ruang yang lebih besar dalam aktifitas perekonomian dan berbagai layanan kebutuhan. Model bisnis baru berbasis digital juga akan semakin berkembang, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Begitu juga dengan produk-produk digital yang akan semakin tumbuh dengan inovasi yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya. Beberapa aplikasi digital pada masa lock down telah memperlihatkan hal tersebut.

Perang digital akan berpeluang menentukan arah jalannya 'permainan' dan pertarungan ekonomi global. Berbagai aturan harus bisa segera beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan ini atau akan terus tertinggal. Kecepatan perkembangan digital dan telekomunikasi dan dampak yang diakibatkan begitu cepat, meluas dan mendalam. Melanjutkan situasi sebelum pandemi, pertarungan teknologi dan penguasaan digital antara AS dan RRC akan menjadi warna penting dalam pertarungan digital secara global.

AS sebagai negara pioner dalam teknologi digital jelas akan mengandalkan Intellectual Property Rights (IPR) sebagai salah satu 'senjata'. Sementara RRC dengan kekuatan data sebagai konsekuensi populasi mereka yang besar akan menjadi andalan penting. Pertarungan dan perlombaan teknologi baru sendiri seperti 5G telah semakin sengit, mengingat China telah menunjukkan agresifitasnya dalam pengembangan teknologi ini dibanyak negara, bahkan hingga ke Eropa. Perluasan jaringan koneksi dan infrastruktur berbasis teknologi China telah menyebar cepat dan meluas.

Salah satu 'perlombaan' penting dalam dunia digital adalah penguasaan data. Penguasaan data adalah penguasaan atas banyak hal melingkupi begitu banyak bidang dan sektor kehidupan, dan tidak hanya terkait ekonomi semata. Melalui perkembangan teknologi, seperti Artificial Intelligence atau AI dan Big Data, tidak ada lagi data yang tidak berarti. Semua data bisa menjadi penting dan berharga. Penguasaan terhadap data berarti juga

penguasaan terhadap pengetahuan, penguasaan pengembangan berbagai bidang, penguasaan pasar, penguasaan kebijakan dan seterusnya.

Penguasaan data dilakukan dengan pengumpulan data melalui semua piranti dan aplikasi yang dimungkinkan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui jaringan, infrastruktur digital dan telekomunikasi menjadi sangat penting dan strategis. Pertarungan tidak hanya sebatas kompetisi terhadap produk dan penguasaan market ITC (Information Telecommunication Technology) tetapi juga melibatkan seluas mana terjadinya pengumpulan dan penguasaan atas data. Belum adanya aturan yang mengontrol pengumpulan, penguasaan dan pemanfaatan data menciptakan ruang yang sangat luas bagi perusahaan-perusahaan besar digital dan telekomunikasi atau Big Tech melakukan penguasaan pasar dan penguasaan data dibaliknya. Termasuk juga konsekuensi langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan atas kontrol data tersebut. Sokongan kapital dibalik perusahaan Big Tech membuat mereka semakin kuat dalam menguasai dan memonopoli ruang digital dan telekomunikasi.

Liberalisasi transmisi elektronik dan digital menjadi landasan yang dibangun dalam perkembangan global. Kebebasan melakukan transmisi lintas negara dan wilayah menjadi syarat yang dipersyaratkan. Kebebasan tidak terikat pada aturan lokal atau negara atas fasilitas digital menjadi model yang harus dilakukan setiap negara. Kebebasan atas penguasaan source code aplikasi digital menjadi 'hak' yang tidak boleh diganggu. Pembebasan pajak dan bea cukai atas transmisi elektronik dan barang digital menjadi model yang terus dijaga secara global.

Hal-hal tersebut setidaknya menjadi bingkai bagaimana Big Tech, negara maju, penguasa teknologi komunikasi dan digital selama ini telah memanfaatkan data yang terkumpul. Bagaimana aturan yang sangat longgar tersebut telah menjadi surga dalam mendapatkan manfaat seluasnya dari data. Walaupun pada kenyataannya, pemanfaatan tersebut tidak sebesar saat ini tetapi dari waktu ke waktu pemanfaatan data terus semakin besar dan meluas secara eksponensial.

Terdapat setidaknya dua fenomena yang patut dicatat dalam perkembangan digital dan telekomunikasi, khususnya terkait dengan pemanfaatan AI. Pertama, masuknya sebuah negara berkembang, China, sebagai 'pemain' penting dalam perkembangan global telekomunikasi dan digital ini. Membanjirnya produk China telah memberikan telah membuat situasi yang me'manja' kan yang sebelumnya dinikmati negara-negara maju menjadi terusik. Reaksi menuntut perubahan aturan atau pembuatan aturan baru terlihat sepabagi upaya mengembalikan situasi bagi 'para pemain lama' dengan sokongan kekuatan

kapital dibelakangnya. Kedua, lahirnya aturan GDPR (General Data Protection Regulation) pada tahun 2018 di Eropa. Skandal Snowden telah menunjukkan bagaimana perusahaan penyedia jasa layanan digital melalui aplikasi dan peralatan elektroniknya menjadi alat pengumpulan data bagi berbagai kebutuhan dan tidak semata dalam rangka kebutuhan bisnis, bahkan bagi kebutuhan intelijen negara seperti AS. Hadirnya GDPR banyak sedikitnya telah memengaruhi 'surga pengumpulan data' menjadi terusik. Akses pengumpulan data bagi perusahaan Big Tech menjadi semakin terbatas, setidaknya di Eropa.

Dampak yang kelihatannya juga mempengaruhi pengembangan AI bagi negara-negara Eropa. Menyadari AI akan memiliki peran penting dalam perkembangan digital dan telekomunikasi, kedua fenomena diatas telah menciptakan komposisi peta persaingan global dalam dunia digital. Walaupun AS masih mendominasi penguasaan teknologi, tetapi RRC telah menunjukkan kemajuan dan kemampuan yang sangat kompetitif, bahkan keunggulan pada beberapa bagian dalam dunia digital. Eropa sebaliknya menjadi sedikit tertinggal dalam 'perlombaan' ini.

Pada negara-negara berkembang digitalisasi menjadi harapan baru bagi peningkatan potensi ekonomi mereka serta solusi bagi berbagai penyediaan fasilitas kebutuhan layanan. Layanan pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan lainnya menjadi lebih mungkin tersedia dalam waktu yang relatif lebih singkat. Bagi miliaran orang dan usaha mikro, kecil dan menengah, menjadi kesempatan membuka pasar maupun kapasitas bagi produksi mereka. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan digital menjadi kebutuhan penting bagi pemenuhan harapan-harapan tersebut. Peran digital dan tidak terbatas pada persoalan ekonomi, semakin kuat memperlihatkan peran pentingnya dalam model perubahan global yang akan terjadi.

Covid-19 yang terjadi pada situasi memasuki krisis global telah memaksa perubahan menjadi begitu dramatis. Krisis 'kilat' yang tidak terelakan telah terjadi hampir pada seluruh negara dan memaksa untuk masuk dalam 'iklim baru' secara global. Komposisi kekuatan ekonomi global terdorong menghadapi dinamika baru dengan tuntutan perubahan 'aturan main'. Trump setidaknya telah memperlihatkan tuntutan tersebut secara lugas baik dalam sikapnya maupun tuntutannya terhadap lembaga-lembaga internasional atas perubahan aturan global. Tuntutan perubahan yang signifikan atas apa yang telah dibangun sejak akhir Perang Dunia Kedua.





SUMBER: DOC.IGJ

BAGIAN - III

## INDONESIA DALAM PUSARAN COVID-19: "PERLAWANAN BURUH TERHADAP GELOMBANG PHK MASSAL & OMNIBUS LAW"

TERBIT :  
April 29, 2020

PENULIS :  
Rachmi Hertanti

Merebaknya wabah Covid-19 telah berdampak terhadap munculnya krisis multidimensi atas kehidupan kelas pekerja di Indonesia. Belum lagi surut persoalan PHK akibat krisis ekonomi yang dialami sebelum hadirnya covid-19, sekarang gelombang PHK massal melonjak secara signifikan sebagai dampak dari stagnan-nya kegiatan perekonomian global dan nasional ditengah pandemi. Dengan meningkatnya angka pengangguran tentu berpeluang besar menimbulkan gejolak sosial di masyarakat bila situasi ini berlangsung lama. Program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menghadapi krisis sosial akibat meningkatnya angka pengangguran secara tajam dipertanyakan efektivitasnya.

Sedangkan disisi yang lain, tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah kepada pengusaha yang kerap memanfaatkan situasi pandemic sebagai alasan yang dipakai untuk melakukan PHK ribuan pekerjanya. Termasuk respon pragmatis pemerintah yang kembali mendorong percepatan penyelesaian pembahasan Omnibus Law sebagai solusi palsu yang ditawarkan, khususnya dalam menghadapi persoalan ekonomi nasional akibat krisis ekonomi global yang terjadi pasca krisis keuangan global tahun 2008. Diperkirakan krisis

ekonomi global akan lebih buruk dari krisis yang terjadi sebelumnya pada tahun 2008. Tentunya hal ini akan mendorong banyak perubahan terhadap tatanan global, termasuk kegiatan supply chain global. Apalagi sulit sekali bisa memprediksi kapan pandemic ini akan berakhir, dan pada akhirnya memaksa kita harus dapat hidup dalam kondisi "Normal yang baru" dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di masyarakat global dan nasional. Oleh karena itu, tantangan gerakan buruh Indonesia ditengah pandemic semakin berat kedepannya. Hal inilah yang disoroti secara tajam oleh tiga narasumber kunci dalam Seri Diskusi Keadilan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) pada 29 April 2020, menjelang Hari Buruh Internasional.

### **Derita Buruh Ditengah Pandemi**

Buruh menjadi kelompok yang sangat terdampak dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah terkait penanganan pandemic. Paling tidak ada tiga hal yang saat ini menjadi perhatian khusus dari gerakan buruh. Hal ini dijelaskan secara gamblang oleh Ky Seza, pengurus cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia yang berada di kawasan Bekasi. Pertama, soal kesehatan dan keselamatan. Upaya penanggulangan penyebaran covid-19 yang dilakukan pemerintah dengan pemberlakuan social distancing atau PSBB, sangat tidak sesuai dengan harapan. Kebijakan ini tidak dipatuhi oleh banyak pihak, termasuk oleh pengusaha. Faktanya, buruh hari ini masih harus tetap bekerja. Kondisi dilematis dihadapi oleh buruh, dimana ketika buruh bekerja mereka harus berhadapan dengan ancaman terinfeksi virus akibat tidak dipenuhinya standar perlindungan oleh pengusaha saat bekerja. Tetapi disisi lain ketika mereka tidak bekerja atau diliburkan, terancam upahnya tidak dibayar oleh pengusaha. Hingga saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang puluhan buruhnya terinfeksi positif covid-19.

Kedua, soal PHK massal dan dirumahkan tanpa upah. Hampir diseluruh basis FPBI di beberapa provinsi, telah terjadi praktek perumahan buruh dengan tindakan pemotongan upah oleh pengusaha. Misalnya yang terjadi di sektor elektronik, telah terjadi perumahan buruh yang upahnya hanya dibayarkan sebesar 50%, dan bahkan ada yang hanya dibayarkan 10%. Hal ini tentu berdampak pada penurunan kualitas kesejahteraan buruh.

Praktek ini kemudian dilegitimasi dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dalam surat edaran ini dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah guna pencegahan dan penanggulangan

covid-19, yang menyebabkan sebagian atau seluruh buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah harus dilakukan dengan membuat kesepakatan antara pengusaha dengan buruh.

Ketiga, rendahnya daya tawar buruh yang tidak punya serikat. Persoalannya, selama ini keputusan pengusaha selalu dilakukan secara sepihak. Bahkan bagi buruh yang bekerja diperusahaan tanpa serikat keputusannya bisa lebih buruk lagi. Ini menjadi memperburuk kondisi buruh di Indonesia, karena masih banyak buruh yang tidak memiliki serikat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh FPBI, hanya sekitar 1,6 juta buruh berserikat, dan sekitar 3,6 juta buruh yang tidak berserikat. Pada akhirnya, gelombang PHK Massal tidak dapat dihindari. Data terakhir yang dirilis oleh Menaker ada sekitar 2,6 juta buruh yang telah dirumahkan dan di PHK. Tetapi sepertinya angkanya saat ini telah naik.

Penanganan pemerintah terhadap covid-19 semakin memperjelas bahwa negara tidak sedang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Fokus penanganan covid-19 lebih dititik-beratkan Pemerintah dan DPR pada upaya penanganan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijawab dengan solusi yang kembali berpihak pada kepentingan modal. Salah satunya adalah dengan mempercepat pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dilakukan tanpa adanya ruang demokrasi. Negara seolah memanfaatkan situasi covid-19 untuk menghindarkan protes dari publik yang "dipaksa" untuk tetap tinggal dirumah sebagai pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Koordinator Penelitian IGJ, Olisias Gultom, menilai bahwa agenda Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja salah satunya adalah untuk mendorong percepatan digitalisasi ekonomi di Indonesia. Kehadiran Covid-19 yang memaksa publik untuk melakukan aktivitas secara terbatas pada akhirnya mendorong proses adaptasi percepatan digitalisasi semakin kencang. Bisa jadi, kondisi ini juga pada akhirnya dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mempercepat transformasinya.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disusun sebelum terjadinya wabah. Menurut Olisias, pada skema yang telah ada sebelumnya, Omnibus Law hendak mendorong terbentuknya model industri baru yang berbasis pada digital, baik pada industri manufaktur maupun industri pelayanan jasa publik lainnya. Ada keinginan pemerintah untuk bisa mendapatkan peluang masuknya investasi asing dari tren digital global yang sedang berkembang hari ini. Inilah yang diharapkan pemerintah dari Omnibus Law, yaitu mengundang banyak investasi asing untuk mendukung terjadinya transformasi ekonomi dan industri di Indonesia.

Olisias juga mencermati, bahwa ada agenda privatisasi lebih luas lagi di sektor pelayanan publik berbasis digital yang hendak diatur dalam Omnibus Law. Covid-19 dapat membuka ruang percepatan privatisasi tersebut ketika peningkatan penggunaan digital semakin terbuka. Hal ini tentu akan membuka kemungkinan dampak terhadap perlindungan data publik ketika perusahaan swasta akan banyak mengelola data publik dalam kegiatan pelayanan jasa. Misalnya hari ini adaptasi penggunaan teknologi dalam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bank, termasuk kegiatan supply chain lainnya. Ke depan bisa jadi digitalisasi akan dipakai untuk menjawab model kehidupan "Normal Baru" pasca covid-19.

Kondisi ini yang sepertinya akan dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Pengusaha dalam mendorong percepatan Omnibus Law. Termasuk salah satunya adalah dalam mendorong perubahan model hubungan industrial. Walaupun kluster ketenagakerjaan akan ditunda pembahasannya, tetapi rencana transformasi ekonomi ini akan tetap memasukan isu ketenagakerjaan. Tinggal menunggu waktu saja kapan pembahasan kluster ketenagakerjaan akan dilanjutkan oleh DPR dan Pemerintah.

Proses digitalisasi industri tentu berpotensi menciptakan PHK Massal. Sebelum covid-19, sudah ada gejala bahwa beberapa tindakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan di sektor tertentu merupakan upaya untuk melakukan transformasi industri, salah satunya di sektoromotif dan elektronik. Kehadiran industri berbasis digital tentu akan menciptakan hubungan kerja model baru. Inilah yang hendak diatur dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, salah satunya adalah mengenai status kerja. Dengan tren digital tentu akan muncul status kerja baru yang sering kali buruh tidak dianggap pekerja, tetapi sebagai mitra. Padahal dari beberapa praktek yang sudah ada, seringkali model status kerja baru ini juga menimbulkan masalah khususnya soal perlindungan hak-haknya.

Olisias juga menekankan, bahwa keinginan pemerintah melakukan transisi ke arah digitalisasi tidak dibarengi dengan upaya untuk melindungi hak buruh dan data publik. Pemerintah masih gagap dalam menghadapi kebutuhan di masa depan. Tentunya hal ini sekali lagi akan membuka ruang monopoli baru bagi pemodal dan sekali lagi kepentingan rakyat yang harus dikorbankan.

### **Mempertanyakan Keseriusan Negara Melindungi Rakyat**

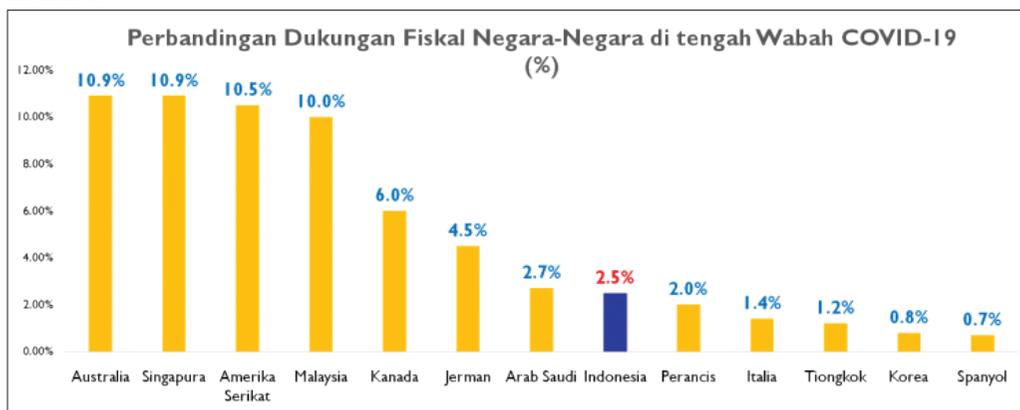
Merebaknya wabah covid-19 akan menimbulkan gejolak sosial yang tajam jika Negara tidak mampu mengatasi dampaknya secara baik. Potensi resesi global yang sangat buruk akan terjadi dan nampaknya pemerintah gagap dalam meresponnya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan bahkan cenderung

dipertanyakan keberpihakannya kepada rakyat. Situasi ini dibahas secara detail oleh Bhima Yudistira, Ekonom INDEF, mengenai lambatnya respon negara dalam mengatasi krisis yang muncul akibat covid-19, khususnya dalam memberikan perlindungan yang baik terhadap buruh.

Bhima menilai bahwa respon pemerintah sangat buruk terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat akibat covid-19. Terjadinya disrupsi aktivitas ekonomi global telah terlihat dampaknya terhadap Indonesia. Terjadinya PHK massal di tengah pandemic telah memperlihatkan peningkatan proyeksi terhadap angka pengangguran dan kemiskinan. Skenario terburuknya, tingkat pengangguran terbuka dapat meningkat tajam hampir dua kali lipat dari 5,2% menjadi 9%, yang jumlahnya bisa mencapai hingga 10 juta orang di akhir 2020. Angka ini berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Prediksi dari SMeru 2020, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya naik sebesar 1%, maka potensi angka kemiskinan naik sebesar 12,3%. Hal ini menjadi alarm buat Pemerintah terhadap situasi yang paling buruk kedepannya. Hanya saja, sangat disayangkan respon pemerintah terhadap situasi ini banyak sekali yang salah sasaran.

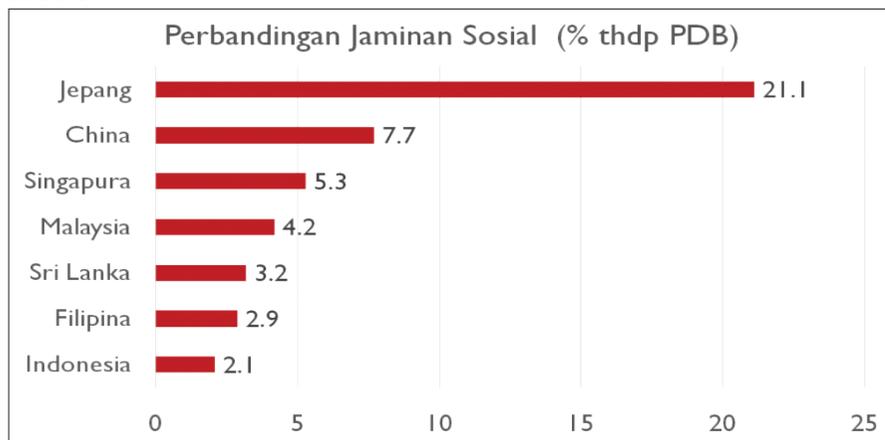
Lebih lanjut Bhima menjelaskan, bahwa dari kebijakan stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menangani covid-19 sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain (*lihat Gambar-1*), yaitu hanya 2,5% dari PDB negara, yaitu sebesar Rp.405 Triliyun. Dari angka ini kembali disayangkan, jumlah yang dialokasikan untuk insentif sosial hanya sebesar Rp.110 Triliyun jika dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan untuk stimulus dunia industri yang mencapai Rp.220 Triliyun. Bahkan alokasi untuk kesehatan hanya sebesar Rp. 75 Triliyun.

GAMBAR - 1



SUMBER: SUMBER: DATA IMF, DIAMBIL DARI PRESENTASI BHIMA YUDISTIRA, "NASIB BURUH DITENGAH PANDEMI COVID-19", DALAM DISKUSI IGJ, 29 APRIL 2020.

GAMBAR - 2



Kecilnya alokasi untuk jaminan perlindungan sosial yang dikeluarkan Pemerintah nampaknya menjadi satu indikator bahwa Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara lain. Menurut Bhima, negara yang memiliki jaminan perlindungan sosial yang besar akan lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi pasca covid-19. Misalnya, alokasi jaminan perlindungan sosial di Jepang mencapai 21% dari PDB, bahkan China sebesar 7,7% dari PDB-nya. Tetapi Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia, Sri Lanka, dan Filipina (*Lihat Gambar-2*) yang sepertinya negara-negara ini akan lebih cepat melaju pasca covid-19 dibandingkan Indonesia.

### **Oligarki Milenial Digital: Aksi "Ambil Untung" Ditengah Pandemi**

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sangat menggambarkan bahwa memang negara tidak sedang melakukan perlindungan untuk rakyat, melainkan kepentingan pengusaha. Bukti negara telah gagal melindungi rakyat adalah ketika jutaan buruh di PHK, nyatanya insentif yang dikeluarkan pemerintah melalui skema kartu pra-kerja ditengah pandemic kembali telah menjadi solusi yang tidak tepat sasaran. Kartu pra kerja adalah program gagal yang dipaksakan oleh pemerintah. Kartu ini ingin mendorong seolah-olah kita sudah masuk pada fase digitalisasi. Pemerintah tidak sadar bahwa korban PHK banyak berusia diatas 40 tahun, yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap teknologi sangat rendah. Mekanisme registrasi digital yang digunakan dalam kartu pra-kerja ini juga membuat banyak buruh tidak bisa lolos seleksi, yang akhirnya mereka tidak dapat menikmati bantuan dari kartu pra-kerja.

Selain itu, konsep kartu pra-kerja sangat tidak terkait dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang terbuka. Misalnya, konten pelatihan yang disediakan

sama sekali dipertanyakan hasil keahlian yang akan dimiliki oleh pekerja. Beda misalnya dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada sebelumnya yang sangat terkait dengan kebutuhan dunia usaha. Sehingga, sertifikat yang dikeluarkan dari kartu pra-kerja ini pun juga tidak dapat diserap oleh dunia usaha. Sebagai informasi, program kartu pra-kerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif yang disediakan negara untuk 5,6 juta orang para pekerja, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli.

Setiap penerima manfaat kartu pra-kerja akan mendapatkan paket manfaat total senilai Rp.3,550 juta. Paket ini terdiri atas bantuan biaya pelatihan sebesar Rp.1 juta yang dapat digunakan untuk membeli aneka paket pelatihan di platform digital yang ditunjuk sebagai mitra pemerintah seperti: Tokopedia, RuangGuru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, dan Sekolahmu. Insentif akan ditransfer melalui rekening bank atau melalui aplikasi fintech lainnya seperti e-wallet, LinkAja, OVO, atau GoPay. Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp.600 ribu/bulan selama 4 bulan berturut-turut dengan total Rp.2,4 juta. Lalu, insentif pasca pengisian survey akan diberikan evaluasi sebesar Rp.50 ribu per survey untuk 3 kali survey dengan total Rp.150 ribu.<sup>1</sup>

Hal yang juga penting untuk dikritisi adalah, terkait dengan anggaran negara sebesar Rp 5,6 Triliyun yang dialokasikan untuk konten pelatihan yang sebenarnya bisa diakses secara gratis di beberapa aplikasi lainnya seperti youtube. Tentu pada akhirnya keuntungan kembali hanya dapat dinikmati oleh perusahaan platform digital yang menjual konten pelatihan dalam program kartu pra-kerja. Lebih lanjut Bhima menilai bahwa skema kartu pra-kerja kembali menghadirkan oligarki model baru, yaitu oligarki milenial berkedok digital. Hal ini karena sebagian besar pemilik perusahaan platform digital yang menikmati uang negara banyak yang menduduki jabatan publik negara. Apalagi, program yang merugikan rakyat ini dilindungi dengan regulasi yang memberikan impunitas terhadap perusahaan termasuk pejabat publik yang berpotensi merugikan keuangan negara, yaitu melalui Perppu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dengan diaturnya aturan impunitas dalam pasal 27 di perppu tersebut, maka jika kemudian program kartu pra-kerja ditemukan bermasalah maka tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara dan tidak dapat digugat ke pengadilan baik pidana, perdata, dan administrasi. Kartu pra-kerja menggunakan budget negara sebesar Rp.20 Triliyun yang angkanya lebih besar dari skandal bailout

1. Sumber Tempo.co.id.

Bank Century. Bisa dibayangkan bagaimana rakyat tidak dapat menuntut kerugian uang negara yang akibat gagalnya kartu pra-kerja.

### **Bangun Solidaritas Ekonomi Rakyat**

Satu hal yang harus menjadi perhatian serius gerakan rakyat hari ini adalah potensi krisis yang berkepanjangan, baik dari sisi gelombang PHK maupun pangan. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemic berakhir. Dengan melihat perbedaan kapasitas negara di dunia dalam menangani pandemic ini, maka kemungkinan disrupsi supply chain global akan terus mendorong kebangkrutan ekonomi global.

Berangkat dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1998, bahwa tulang punggung ekonomi berada ditangan usaha produksi rakyat, dan bukan korporasi besar termasuk negara. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis multidimensi berkepanjangan, gerakan rakyat harus membangun strategi ekonomi kolektif, termasuk membangun jaring produksi bersama. Bhima menyampaikan misalnya di Yogyakarta, gerakan rakyat bantu rakyat telah membangun jaring supply chain dari petani yang digunakan untuk membantu buruh terdampak PHK, termasuk masyarakat miskin lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Termasuk FPBI dalam rangka membangun solidaritas ekonomi, saat ini telah membangun posko-posko di tiap pabrik dan melakukan advokasi persoalan gelombang PHK dengan membentuk FPBI-Care. Ky Seza juga menyampaikan, selain solidaritas tersebut, FPBI juga melihat bahwa kondisi PHK yang mendorong terhentinya produksi seharusnya bisa menjadi peluang bagi gerakan buruh untuk mengambil-alih pabrik dan membangun strategi kolektif tentang rantai pasok produksi.

Inisiatif ini tentu harus terhubung dengan kekuatan ekonomi desa. Desa merupakan kunci produksi dan basis daya tahan ekonomi yang jauh lebih kuat. Menanggapi hal ini, Olisias juga menekankan bahwa ada peluang untuk mengkaitkan antara kekuatan ekonomi desa dengan kekuatan teknologi digital untuk memaksimalkan kekuatan ekonomi rakyat. Belajar dari China misalnya dimana salah satu kekuatannya terletak di desa dengan membangun industri-industri skala kecil berbasis desa. Itu yang diperkuat dan dihubungkan dengan teknologi digital yang kemudian akumulasinya saat ini begitu kuat. Inilah yang dibutuhkan, merebut kembali ekonomi rakyat.





SUMBER: DOC.IGJ

BAGIAN - IV

## **INDONESIA DALAM PUSARAN COVID-19: MONOPOLI PENGETAHUAN DAN AKSES PADA INOVASI KESEHATAN SERTA PEMANFAATAN BERSAMA YANG BERKEADILAN**

TERBIT :  
JULI 11, 2020

PENYUSUN :  
Agung Prakoso  
Rachmi Hertanti

Hampir semua negara di dunia telah terdampak pandemi COVID-19, tidak terkecuali negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris serta negara berkembang seperti Indonesia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan besar terlebih karena keterbatasan dan ketergantungan terhadap impor peralatan medis guna penanganan pandemi. Sebuah keyakinan bahwa Satu-satunya cara untuk mengembalikan kehidupan normal adalah memastikan bahwa penyebaran virus dapat diperlambat sambil mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi diagnostic, ketersediaan medical tools and treatment yang mencukupi, dan termasuk vaksin.

Selama ini penerapan ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual, baik terkait dengan paten maupun terhadap persoalan know-how, atas obat dan inovasi kesehatan di berbagai ketentuan baik WTO, WIPO, WHO, dll, telah menjadikan kesehatan menjadi komoditas bisnis, dan pada akhirnya menghilangkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang murah, berkualitas, dan berkeadilan. Upaya pencarian vaksin dari virus Covid-19 termasuk memproduksi

secara mandiri alat tes untuk identifikasi virus telah dilakukan, baik pada level nasional maupun global. Sudah banyak desakan dari kelompok masyarakat sipil di dunia untuk segera menghentikan penanganan pandemic ini dengan cara business as usual, termasuk menjadikan kebutuhan medical tools and treatment termasuk vaksin menjadi barang publik (*public goods*) yang kemudian dapat didistribusikan dan dapat diakses secara berkeadilan.

Untuk itu, tulisan ini akan mengurai soal isu monopoli pengetahuan dan akses pada inovasi kesehatan serta pemanfaatan bersama yang berkeadilan dalam merespon Covid19, yang bersumber dari Webinar Seri Diskusi Keadilan Ekonomi IGJ pada 19 Mei 2020.<sup>(2)</sup>

### Isu Ketimpangan Terhadap Akses Obat Dan Alat Kesehatan Dalam Penanganan Covid19<sup>(3)</sup>

Penanganan pandemi COVID-19 tidak dapat terlepas dari kebutuhan peralatan medis seperti Alat Pelindung Diri (APD), test kit, ventilator, obat-obatan, vaksin, dan lain-lain. Akibatnya berbagai macam peralatan medis menjadi rebutan bagi banyak negara yang menyebabkan harganya menjadi mahal. Terlebih ketika ada beberapa negara yang bisa membayar dengan harga lebih tinggi sehingga barang yang sudah dijadwalkan ekspornya pun dapat dibatalkan demi dijual ke negara lainnya. Hal ini juga terjadi pada obat-obatan. Meskipun WHO menyatakan belum ada obat yang terbukti ampuh, namun obat-obatan seperti remdisivir dan lopinavir juga menjadi rebutan. Di tengah kondisi ini, beberapa perusahaan farmasi seperti Gilead yang memproduksi remdisivir dan Sanofi yang meneliti vaksin justru menyatakan akan mengutamakan pasar negara besar seperti Amerika Serikat.

Inisiatif global lainnya adalah peluncuran *the Access to Covid19 Tools* (ACT) yang diorganisir oleh beberapa negara seperti Uni Eropa, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Saudi Arabia, Norwegia, Spanyol, dan Inggris. Program ACT ini adalah upaya untuk mempercepat pengembangan diagnostik, vaksin, dan perawatan yang dibutuhkan dunia guna mengakhiri pandemic global covid19. Ini adalah kolaborasi kerja antara WHO, Negara, dan sektor bisnis. Respon terhadap inisiatif global ini telah menghasilkan janji negara-negara untuk mengumpulkan sumber daya dalam rangka memulai kegiatan pengembangan, yang hingga Mei 2020 telah mencapai angka 7,4 Miliar Euro.

Negara-negara yang berjanji untuk menyeter modal seperti Komisi Eropa menjanjikan 1,4 miliar euro, sementara kontributor terkemuka lainnya termasuk Prancis (510 juta euro), Jerman (525 juta), Jepang (762 juta), Spanyol (125 juta), Kanada (551 juta), Norwegia (188 juta), Inggris (441 juta) dan Italia (71,5 juta).<sup>(4)</sup> Namun, disisi yang lain negara-negara berkembang dan

2. Diskusi menghadirkan tiga narasumber: Lutfiyah Hanim (Peneliti Third World Network); M.Azhar, SH., LL.M (Akademisi UNDIIP); dan Yenny Sucipto (Pakar Anggaran Publik).
3. Sebagian dikutip dari paparan Lutfiyah Hanim (Peneliti TWN) dalam diskusi keadilan ekonomi IGJ 19 Mei 2020.
4. Sumber: <https://twon.my/title2/health.info/2020/hi200506.htm>

terbelakang mempertanyakan soal adanya jaminan akses yang berkeadilan, baik terkait financial maupun distribusi dari produksi vaksin dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan.

Untuk mengatasi ketimpangan akses obat dan alat kesehatan, pada akhirnya WHO melalui pertemuan *The World Health Assembly (WHA)* ke-73 mengadopsi sebuah resolusi terkait Covid-19 yang menyerukan akses dan distribusi yang adil dari semua teknologi dan produk kesehatan penting untuk memerangi virus. Resolusi ini juga kembali mempertegas komitmen dari seluruh negara mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mengisi kesenjangan untuk mengatasi pandemic. Termasuk mengakui peran imunisasi luas terhadap COVID-19 sebagai barang publik global untuk kesehatan dalam mencegah, menahan, dan menghentikan penularan guna mengakhiri pandemi, vaksin yang aman, berkualitas, manjur, efektif, mudah diakses, dan terjangkau tersedia.<sup>5</sup>

Pentingnya memastikan obat, treatment, dan produk kesehatan sebagai barang publik global dalam menangani pandemic covid19 dikarenakan keengganan beberapa negara kaya untuk mau membuka akses terhadap hal-hal tersebut yang selama ini dilindungi oleh rezim aturan perlindungan hak kekayaan intelektual. Inovasi ditengah pandemic masih juga dijadikan komoditas bisnis yang menguntungkan sebagian kecil kelompok. Hal ini ditunjukkan dari keengganan negara seperti AS dan Eropa yang masih menerapkan standar ganda dengan enggan memberikan penegasan secara eksplisit untuk merujuk pada penerapan fleksibilitas TRIPS untuk kesehatan publik terkait dengan akses obat dan inovasi produk kesehatan lainnya. Amerika Serikat, walaupun tidak menolak resolusi yang dihasilkan dalam WHA ke-73, tetapi ia menjadi negara yang sangat kuat untuk tidak mau terikat kepada beberapa paragraph tertentu di dalam resolusi. Hal itu seperti paragraf 4, 8.2 dan 9.8 operatif yang merujuk pada Perjanjian TRIPS dan Deklarasi Doha 2001 tentang fleksibilitas TRIPS dan Kesehatan Publik.

### **Aturan dalam Negeri yang Tumpang Tindih**

Dalam melaksanakan kebijakan terkait COVID-19, Pemerintah memerlukan berbagai instrumen hukum. Regulasi ini akan berguna sebagai landasan pemerintah. Namun dalam penerapannya sering kali kurang maksimal. Contohnya pemerintah masih sering kali plin-plan dalam mengeluarkan instrumen hukum dalam mengendalikan masyarakat. Seiring kenaikan kasus, pemerintah justru melonggarkan peraturan. Upaya untuk riset dan penanganan pandemi terkendala karena aturan yang tumpang tindih. Pemerintah mengeluarkan empat kebijakan, Pertama, membentuk konsorsium

5. Sumber: <https://twinkl.com/property/info-service/2020/ip200509.htm>

riset dan inovasi covid. Kedua, keanggotaan riset dan inovasi covid19. Ketiga, melaksanakan program konsortium riset. Keempat, kolaborasi antara konsorsium dengan Lembaga Negara Non-Kementerian. Namun kebijakan ini masih saling tumpang tindih. Dalam pengupayaan terhadap vaksin misalnya, belum terdapat istilah yang mengarah pada suatu pembentukan tim khusus yang mengupayakan penemuan ataupun penyediaan vaksin.<sup>6</sup>

Tumpang tindih aturan ini harus cepat diatasi oleh pemerintah karena dalam penanganan pandemi diperlukan instrumen hukum yang kuat untuk kepentingan umum. Tumpang tindih aturan akan menghambat beberapa aturan lain seperti mengenai lisensi wajib yang sebenarnya sudah diakomodir oleh UU Paten, namun masih memerlukan instrumen hukum yang lebih spesifik mengenai kedaruratan publik. Terlebih pengertian kedaruratan publik yang luas dalam Pasal 109 UU Paten yang sejalan dengan Pasal 31 TRIPS.

### **Penanganan Anggaran COVID-19 Harus Dimaksimalkan**

Pemerintah dalam membuat kebijakan terkait anggaran yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu : Pertama, bidang Kesehatan sebesar Rp75 triliun, social safety net sebesar Rp110 triliun, dan dukungan dunia usaha (Perpajakan DTP (Pajak DTP dan Bea Masuk DTP) sebesar Rp70,1 triliun.<sup>7</sup> Penganggaran penanganan COVID-19 tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah. Pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang mengatur percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Beberapa daerah melakukan pengadaan alat kesehatan sendiri di luar dari yang disediakan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini pemerintah juga tengah mendorong produksi alat kesehatan seperti APD dan bahan baku obat di dalam negeri.<sup>8</sup> Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga yang dimotori oleh Bappenas juga menyiapkan road map soal jaminan kesehatan dan reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

Penanganan COVID-19 memerlukan penanganan yang komprehensif dari Pemerintah. Pemerintah harus dapat berkomitmen kuat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seperti memaksimalkan penggunaan fleksibilitas TRIPS dalam rangka mendorong akses pada obat-obatan dan mendorong kesehatan sebagai barang publik, bukan sebagai komoditas. Disisi lain pemerintah juga harus mengantisipasi dorongan dari negara-negara luar yang terus menginginkan agar adanya aturan yang lebih komprehensif dari TRIPS yang dikenal dengan TRIPS Plus di berbagai FTA.



SUMBER : [HTTPS://WWW.JONESDAY.COM/](https://www.jonesday.com/)

BAGIAN - V

## DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: "TANTANGAN AKSES PUBLIK ATAS VAKSIN DAN LAYANAN KESEHATAN BERKEADILAN"

TERBIT :  
November, 2020

REPORTER :  
Agung Prakoso  
Intan Baretta Nur Azizah  
Rachmi Hertanti

### Uraian Diskusi Keadilan Ekonomi

Sebuah keyakinan bahwa Satu-satunya cara untuk mengembalikan kehidupan normal adalah memastikan bahwa penyebaran virus dapat diperlambat sambil mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi diagnostic, ketersediaan medical tools and treatment yang mencukupi, dan termasuk vaksin. Namun dalam prosesnya masih banyak negara yang belum memiliki teknologi serta infrastruktur yang mumpuni dalam proses pengadaan vaksin, terlebih pengetahuan seputar hal ini sering kali dimonopoli oleh korporasi yang berasal dari negara-negara maju. Indonesia sendiri mengalami keterbatasan dalam infrastruktur dan teknologi sehingga dalam pengadaan vaksin masih memerlukan kerja sama dengan negara lain melalui upaya diplomasi bilateral dan multilateral.

Pendekatan bisnis masih digunakan dalam penanganan Covid-19. Penguatan aturan perlindungan paten yang berdampak pada monopoli pengetahuan dan produksi berujung pada kontrol harga dan pasokan. Hal ini tentu akan membuat negara berkembang, khususnya Indonesia, akan menghadapi persoalan pembiayaan pengadaan vaksin dan

alat kesehatan lainnya terkait dengan pandemic covid19, apalagi ditengah resesi ekonomi yang masih membayangi. Pelaksanaan dalam produksi dan distribusi vaksin telah menjadi sorotan masyarakat sipil hari ini khususnya untuk memastikan akses vaksin dan alat kesehatan lainnya sebagai barang publik untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk vaksin yang beredar nantinya terjamin keamanannya dan efektif bagi masyarakat.

Masalah ini telah dibahas oleh *Indonesia for Global Justice (IGJ)* bersama *Indonesia AIDS Coalition (IAC)* dan Koalisi Obat Murah dalam diskusi daring yang bertajuk "Diplomasi Vaksin Covid-19 Indonesia" pada 12 November 2020. Berbagai narasumber dan perspektif telah diangkat baik dari CSO, akademisi, pakar kesehatan masyarakat, pemerintah, maupun DPR RI.<sup>9</sup> Diskusi ini bertujuan untuk memastikan publik terinformasi mengenai pentingnya akses vaksin dan alat kesehatan menjadi barang publik dan tidak dikomersialkan ditengah pandemic, termasuk memastikan perlindungan HAKI khususnya Paten untuk tidak disalah gunakan guna kepentingan profit perusahaan farmasi dan kelompok-kelompok yang mencoba mencari keuntungan ditengah pandemic hari ini.

## Upaya Global Membuka Akses Vaksin Untuk Semua

*"No one is safe until everyone is safe"*

*(Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus)*

Bicara penanganan covid-19, hampir semua terkait dengan persoalan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Peneliti Third World Network, Lutfiyah Hanim, menjelaskan bahwa hampir seluruh Produk kesehatan dalam penanganan Covid-19 seperti tes kit, diagnostik, masker, obat-obatan, vaksin, dan ventilator dilindungi dalam hak paten, rahasia dagang, dan desain industri. Terlebih aturan TRIPS di WTO masih tetap dipertahankan hingga saat ini, dan Indonesia telah banyak mengubah aturan HKI nya pasca meratifikasi WTO.

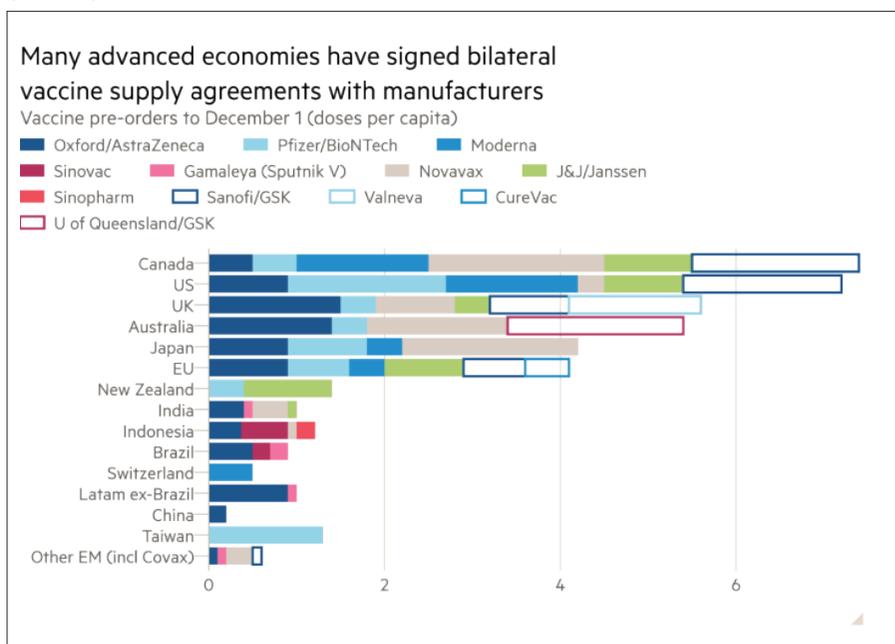
Ketentuan perlindungan HKI telah memonopoli pengetahuan yang dikontrol penuh oleh industri farmasi di negara maju. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 memiliki tantangan yang begitu besar, apalagi ketika perusahaan farmasi masih tetap menggunakan pendekatan *business as usual* dalam prakteknya. Kita sedang menghadapi Pandemi, maka sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang di dunia dapat mengaksesnya dan tidak boleh ada yang tertinggal. Dalam penanganan pandemic covid-19, ada banyak sekali tantangannya, baik dari segi efikasi dan keamanan, akses (harga, ketepatan, kecukupan), alokasi, dan pelaksanaan (distribusi). Dengan pendekatan bisnis

9. Diskusi ini menghadirkan Lutfiyah Hanim dari Third World Network, Erik Mangajaya dari Direktorat Perjanjian Hukum dan Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Dr. Sumayati Arjoso dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Netty Prasetyani, Anggota Komisi IX DPR RI, dan Ferdiansyah, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

oleh korporasi, tentu akan sulit sekali kita bisa menjawab tantangannya, apalagi jika aturan perlindungan HKI tetap diperketat. Lebih lanjut Hanim menjelaskan, bahwa di level internasional saat ini paling tidak ada beberapa upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menjawab tantangan penanganan pandemic Covid-19.

Pertama, upaya bilateral. Sudah banyak sekali negara-negara yang melakukan transaksi secara bilateral dengan perusahaan farmasi, khususnya negara-negara maju yang memiliki kemampuan untuk membeli secara langsung. Tapi tentu, dengan upaya bilateral atau yang seringkali disebut dengan isu nasionalisme vaksin cenderung memunculkan persoalan kesenjangan dengan negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang akibat keterbatasan kemampuan pembiayaannya. Upaya ini dilakukan walaupun vaksin tersebut belum dinyatakan aman (*Lihat gambar 3*). Saat ini, sering kali kita mendengar klaim sepihak dari perusahaan farmasi yang berlomba untuk mengatakan bahwa vaksin temuannya sudah memiliki efektivitas hingga 90%. Misalnya, dari 154 kandidat vaksin pra klinis yang sedang diuji, baru sebanyak 21 vaksin masuk uji klinis fase 1 yang sedang diuji keamanan kepada orang muda yang sehat, sebanyak 13 vaksin sedang uji klinis fase 2 sedang diujikan kepada sekelompok orang, dan sejauh ini baru hanya ada 10 kandidat vaksin yang sudah berada uji klinis fase 3 dan sedang dalam uji dampak covid-19 skala internasional. Hasil

GAMBAR - 3



SUMBER: DIUNDUH DARI [HTTPS://WWW.FT.COM/CONTENT/3A37C3F5-20FC-4D1F-8DD4-2FD966C27542](https://www.ft.com/content/3a37c3f5-20fc-4d1f-8dd4-2fd966c27542)

akhirnya belum diumumkan. Jadi, belum ada vaksin yang sudah disetujui dan diberikan izin oleh WHO untuk dapat digunakan oleh umum.<sup>10</sup>

Kedua, upaya TRIPS Waiver. Proposal ini diusulkan pada 2 oktober 2020 oleh India dan Afrika Selatan di WTO untuk memperbolehkan semua negara tidak memberikan atau tidak menegakan aturan HKI terkait dengan penanganan Covid-19 baik untuk obat, test kit, vaksin, atau teknologi lain selama pandemic berlangsung sampai imunitas global tercapai. Hal ini sangat penting dalam rangka memberikan ruang kebijakan yang cukup luas bagi seluruh negara, khususnya negara berkembang, untuk penelitian, lokal manufaktur, supply, dan lainnya dalam rangka penanganan Covid-19. Indonesia sendiri telah ikut menyetujui, tetapi dalam proses pembahasannya juga masih sangat kuat tarik-menarik antara negara yang mendukung dengan yang tidak mendukung. Walaupun Indonesia mendukung proposal TRIPS Waiver, Kementerian Luar Negeri sendiri masih akan melihat sejauh mana dinamika proposal TRIPS Waiver ini akan memberikan Waiver secara keseluruhan ataukah akan ada tawar-menawar lagi kedepannya. Menurut Kemlu, dalam hal ini posisi Indonesia lebih untuk mencari titik tengahnya, karena, jika proposal ini terlalu ekstrem juga akan sulit diterima secara politik.

Menanggapi hal ini Akademi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Ferdiansyah, menyampaikan bahwa seharusnya diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap vaksin menekankan pada diplomasi kemanusiaan. Model kerja sama South-south cooperation juga dapat didorong karena pada umumnya model kerja sama ini membangun solidaritas, ketimbang kompetisi yang dibawa oleh negara utara. Maka dari itu pilihan ideal untuk negara seperti Indonesia adalah jika proposal TRIPs Waiver bisa disepakati sehingga kita bisa punya kebijakan dengan memproduksi vaksin lokal. TRIPs Waiver dalam penanganan Covid-19 jika dapat di terima dan diimplementasikan ke negara anggotanya maka akan dapat mengatasi hambatan HAKI untuk memastikan distribusi yang adil, regulasi kebijakan, termasuk upaya untuk menurunkan harga.

Ketiga, upaya melalui *Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator*. Inisiatif ini adalah kolaborasi global untuk mempercepat pengembangan produksi dan akses yang berkeadilan untuk Covid test kit, treatment, dan juga vaksin. Terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya WHO, Gavi, CEF, Unitaid, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, World Bank, The Global Fund, dan Find. Khusus untuk vaksin, dibahas dalam satu pilar yang bernama *The Covid-19 Technology Access Pool (CTAP)*. CTAP sebagai satu wadah untuk berbagi secara sukarela membagikan pengetahuan, kekayaan intelektual, dan data terkait teknologi kesehatan COVID-19. Namun, inilah tantangan dari CTAP, dimana

10. <https://www.gavi.org/tag/covid19>

sifatnya hanya sukarela dimana masih banyak sekali perusahaan farmasi yang masih enggan untuk berbagi apalagi dengan pendekatan profit. Tantangan lainnya yang juga muncul dalam inisiatif ini adalah terkait dengan transparansi dan tata kelolanya yang masih dipertanyakan khususnya untuk menjadikan vaksin dan alat kesehatan lainnya sebagai barang publik.

### **Diplomasi Vaksin: "Upaya Pengadaan Vaksin Indonesia"**

Indonesia saat ini sangat aktif melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mendapat akses vaksin. Erik Mangajaya, Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan upaya pengadaan vaksin oleh Pemerintah Indonesia dilakukan melalui dua cara, yaitu kesepakatan bilateral, kerjasama CEPI dan GAVI, dan upaya pengembangan vaksin secara nasional atau dikenal dengan vaksin merah-putih. Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah tentu dalam rangka untuk memastikan ketersediaan kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia.

Melalui Keppres No. 18 tahun 2020 Pasal 9 dan 10 mengenai Tim Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perppu No. 1 tahun 2020, Menteri Luar Negeri berperan dalam Tim Pengembangan Vaksin COVID-19. Selain itu Perpres No. 99 tahun 2020 juga telah menyebutkan kerja sama dengan lembaga atau badan internasional seperti *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI)* dan *The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)*. Dasar hukum inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan diplomasi vaksin untuk percepatan dan kepastian pengadaan vaksin COVID-19 sesuai kebutuhan pemerintah.

Sejauh ini secara bilateral, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa kandidat vaksin COVID-19, diantaranya dengan Republik Rakyat Tiongkok melalui Sinovac, Inggris melalui Astra-Zeneca, Uni Emirat Arab melalui G24. Pada 3 Desember 2020, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Pertama, vaksin produksi PT Bio Farma (Persero). Kedua, vaksin produksi AstraZeneca. Ketiga, vaksin China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm). Keempat, Moderna. Kelima, Pfizer Inc. dan BioNTech. Keenam, Sinovac Biotech.<sup>(11)</sup>

Dalam mengupayakan vaksin, Pemerintah Indonesia juga mendorong adanya kerjasama terkait dengan alih teknologi. Misalnya, kerjasama yang dibangun pemerintah dengan Sinovac juga mensyaratkan adanya transfer teknologi ke dalam industri nasional. Menurut Erik hal ini sangat penting apalagi ketika

11. Artikel ini telah tayang di [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dengan judul "Terawan Tetapkan 6 Jenis Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan di RI", <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5fcb66ba0f184/terawan-tetapkan-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-akan-digunakan-di-ri>

Covid-19 terjadi telah berdampak cukup besar terhadap sektor kesehatan nasional yang sangat ketergantungan dengan impor. Tidak hanya obat, tetapi juga alat-alat kesehatan lainnya. Untuk itulah situasi ini akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan kemandirian industri kesehatan Indonesia. Misalnya, hal yang juga ditarget Pemerintah dalam kerjasama CEPI adalah menjajaki peluang kerja sama sebagai mitra pengembangan dan produksi vaksin CEPI di mana Bio Farma telah masuk dalam shortlist potential manufacturers for Covid-19 vaccine CEPI.



Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, juga mengungkapkan desakan Komisi 9 kepada Pemerintah untuk menjadikan Covid-19 sebagai momentum bagi Indonesia untuk bisa mengimplementasikan Inpres No.6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat-alat kesehatan. Memastikan kemandirian nasional dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bisa ditingkatkan. Untuk itu terkait dengan pengadaan vaksin Komisi 9 mengharapkan agar Indonesia bisa segera memproduksi Vaksin "Merah-Putih" yang walaupun mungkin baru selesai di tahun 2022.

Hal lain yang ditekankan oleh Netty terkait dengan pengadaan vaksin, ia menekankan pentingnya pemerintah melakukan komunikasi publik yang baik. Hal ini karena, banyak masyarakat yang terdistorsi dari informasi yang berdampak terhadap respon skeptis dari upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah hari ini. Jangan sampai kemudian ini menjadi hambatan besar dalam penanganan covid-19.

Keterbukaan informasi kepada publik yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yaitu: Pertama, tentang kepastian keamanan dari vaksin. Perlu ada penjelasan yang cukup detail dari pemerintah terkait dengan efektivitas dan keamanan vaksin. Pemerintah harus memastikan bahwa vaksin yang dibeli bisa dijamin tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan, sehingga publik bersedia untuk divaksinasi. Berdasarkan informasi yang ada hingga hari ini, Pemerintah mengklaim uji klinis tahap ketiga dari Vaksin Sinovac dapat

dikatakan aman, karena tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada relawan yang menerima vaksinasi. Efek samping ditemukan namun dalam skala kecil dan tingkat ringan pada sebagian sukarelawan.<sup>(12)</sup>

Kedua, soal kemampuan pengadaan vaksin. Untuk mencapai herd immunity, paling tidak pemerintah harus melakukan vaksinasi 70% dari total populasi, dan itu harus dilakukan sebanyak dua kali. Berdasarkan Perpres No. 99 Tahun 2020 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, pemerintah telah menunjuk langsung BioFarma. Tentu kapasitas produksi BioFarma juga terbatas dan harus menggandeng perusahaan lain untuk memperbesar kapasitas produksinya. Terkait dengan ketersediaan vaksin, pada 6 Desember 2020 Pemerintah mengumumkan bahwa sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac sudah sampai di Jakarta, dan sebanyak 1,8 juta dosis lainnya akan dikirimkan menyusul pada Januari 2021.<sup>(13)</sup>

Ketiga, perlunya transparansi dalam aspek pembiayaan. Soal harga telah menjadi masalah yang cukup sensitive, misalnya kemarin pengalaman dari penetapan harga Rapid test dan PCR. Termasuk keterbukaan informasi mengenai kemampuan anggaran negara untuk menyediakan vaksin untuk seluruh masyarakat secara gratis. Keputusan terbaru dari Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 menyatakan bahwa Pemerintah akan menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat.<sup>(14)</sup>

Namun, transparansi mengenai harga yang didapat dari perusahaan farmasi juga perlu dibuka, karena ini akan berdampak terhadap beban anggaran keuangan negara. Misalnya, dalam pembahasan Panja Tata Kelola Obat di Komisi 9 juga mencatat besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh Pemerintah terkait pembelian bahan baku ke Sinovac yang angkanya bisa mencapai belasan triliun rupiah. Prosesnya harus transparan, anggaran yang digunakan juga akuntabel. Pemerintah harus bisa menjelaskan berapa jumlah pembelian, berapa harganya, kemudian ketika diproduksi secara massal nanti berapa harganya per satuan vaksin.

### **Vaksinasi, Siapa Lebih Dahulu?**

Untuk mencapai "herd immunity" dan menurunkan angka kematian Covid-19, vaksinasi menjadi langkah yang amat penting. Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr.Sumarjati Arjoso, menyampaikan bahwa Vaksinasi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penularan penyakit. Namun, pemberian vaksinasi harus dilaksanakan secara hati-hati karena harus memastikan keamanannya (safety) dan efektifitasnya/bermanfaat.

12. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengetahui Vaksin Sinovac yang Telah Tiba di Indonesia", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/08/110300765/mengenal-vaksin-sinovac-yang-telah-tiba-di-indonesia?page=all>

13. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/170600565/vaksin-corona-sinovac-tiba-di-indonesia-ini-perbandingan-harganya-dengan?page=all>

14. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/16/14150871/jokowi-akan-jadi-orang-pertama-yang-disuntik-vaksin-covid-19>

GAMBAR - 4

<b>SASARAN VAKSINASI COVID-19</b>			
<b>Pentahapan Prioritas sesuai dengan ketersediaan vaksin, penduduk dan wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian</b>			
<b>IDEAL : SELURUH PENDUDUK</b>			
<b>OPTIMAL : 80% PENDUDUK BERISIKO TERTULAR</b>			
Prioritas	Kelompok Prioritas	Jumlah Orang	Kebutuhan Vaksin (Dosis)
1	Garda terdepan : Medis dan Paramedis Contact tracing, pelayanan publik termasuk TNI/Polri, aparat hukum	3.497.737	6.995.474
2	Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), sebagian pelaku ekonomi)	5.624.0106	11.248.020
3	Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat PT)	4.361.197	8.772.3942
4	Aparatur pemerintah (Pusat, Daerah dan Legislatif)	2.305.689	4.611.378
5	Peserta BPJS PBI	86.622.867	173.245.734
	Sub total	102.451.500	204.903.000
	Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya	57.548.500	115.097.000
	<b>Total</b>	<b>160.000.000</b>	<b>320.000.000</b>

SUMBER: PRESENTASI SUMARJATI ARJOSO DALAM DISKUSI IGJ "DIPLOMASI VAKSIN INDONESIA" (12/11), DIAMBIL DARI GRAND DESIGN/ROADMAP PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19, KEMENKES 2020.

Kementerian Kesehatan telah membuat Grand Design pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Paling tidak vaksinasi dilakukan terhadap 80% dari total populasi. Bahkan, pemerintah telah menetapkan kelompok prioritas dari kegiatan vaksinasi (*Lihat Gambar 4*). Terkait dengankriteria prioritas penerima vaksin, harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah, termasuk soal prioritas wilayah penerima vaksinnya. Ini menjadi masalah besar juga, karena layanan kesehatan di Indonesia sangat berbeda-beda kesiapannya.

Lebih lanjut Sumarjati menjelaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sendiri estimasi kebutuhan anggaran pengadaan vaksin Covid-19 yang mencapai Rp.46 triliun hingga Rp.62 triliun, hal itu belum termasuk anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan imunisasi. Dukungan logistic dan distribusi juga menjadi persoalan sendiri. Oleh karena itu, Negara harus bisa mengkomunikasikan kepada semua orang mengenai jaminan tidak akan adanya diskriminasi terhadap akses terhadap vaksin baik soal harga, distribusi, maupun keterjangkauan.



SUMBER : [HTTPS://WWW.JONESDAY.COM/](https://www.jonesday.com/)

BAGIAN - VI

## **CERITA DARI PELOSOK NEGERI: AKSI KOLEKTIF GERAKAN SOSIAL INDONESIA MERESPON COVID19**

TERBIT :  
September 1, 2020

PENULIS :  
Muslim Silaen

Pandemik Covid-19 membawa cerita yang memilukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerita Pilu di tambah oleh kelambatan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana di tahun 2020. Kebijakan pemerintah dengan membuat dan menerapkan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19 pada 31 Maret 2020. Kebijakan ini membuat banyak dampak, terutama turut menyumbang kelambatan menanggulangi Covid-19. Cerita dilematis muncul dari kebijakan ini, mulai dari penurunan aktifitas ekonomi yang berjangka panjang membuat banyak perusahaan yang mengambil kebijakan pengurangan pekerja, menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan aktifitas sosial, Pendidikan Jarak Jauh yang menyisakan problem teknis dan nonteknis. Pelayanan Kesehatan yang terganggu karena paranoid penyebaran Covid-19 sampai pada kesulitan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan tambahan lainnya.

Lambatnya peran serta pemerintah dalam mengkomodir permasalahan yang muncul membuat banyak kalangan masyarakat kehilangan kepercayaan pada kapasitas

pemerintah untuk membantu mereka dalam menghadapi situasi saat ini. Institusi Negara merupakan satu-satunya lembaga social yang memiliki sumberdaya menjawab kondisi saat ini ternyata hanya memberi solusi BLT yang bersumber dari APBN dan APBDes. Kesabaran rakyat untuk mempercayai Pemerintah sebagai pelaksana kepemimpinan Negara sampai pada titik kehilangan kepercayaan, maka rakyat mulai mengorganisir dirinya sendiri dalam berbagai aktifitas solidaritas yang bersumber dari sumberdaya rakyat sendiri. Munculah sebuah aksi kolektif gerakan sosial di beberapa wilayah Indonesia untuk merespon situasi pandemic dalam rangka memperkuat solidaritas diantara masyarakat.

Cerita tersampaikan dalam diskusi Suara dari pelosok Negeri yang diadakan Indonesia For Global Justice (IGJ) bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), medio 24 April 2020 sampai 20 Mei 2020 dengan 8 serial diskusi, dengan partisipasi pembicara dari 17 Provinsi di Indonesia bercerita tentang munculnya model gerakan sosial merespon kelambatan Negara. Berbagai model bermunculan mulai dari solidaritas sebagai respon cepat di lakukan dengan menggalang pendanaan untuk pemenuhan alat pelindung diri (masker, HandSanitizer, dll) sampai pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan secara massif. Dan sebuah gerakan terorganisir dengan penguatan koperasi untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar, membangun membuat lahan pertanian sampai mengadakan Dapur Umum.

### **Sumatera Barat: Gerakan Koperasi Mandiri dan Merdeka**

Komunitas Majelis Dosen Muda di Universitas Andalas sebelum pandemik merintis sebuah gerakan koperasi. Semasa pandemic mereka menguatkan kapasitasnya sebagai bagian dari gerakan solidaritas secara kolektif untuk membantu rakyat. Gerakan ini menilai ada beberapa pekerjaan yang mengalami penurunan pendapatan cukup drastic melalui survey yang dilakukan Fakultas Ilmu social dan Ilmu politik Universitas Andalas yaitu pedagang kecil pelaku UMKM, pekerja harian lepas, pegawai dengan gaji tidak tetap, sopir, ojek dan pekerja rumah tangga. Dari 1007 Responden yang diwawancarai hanya 36% yang pendapatannya tetap, 12% mengalami peningkatan pemasukan dan 52% mengalami penurunan pendapatan. Responden yang mengeluhkan penurunan pendapatan sekitar 70%. Mereka mengalami peningkatan pengeluaran, antara 10 sampai 25% dari hari-hari sebelumnya.

Koperasi Mandiri dan Merdeka (KMDM) melihat dengan lambatnya pemerintah memberikan perlindungan social kepada rakyat mengambil sebuah tesis bahwa gerakan ekonomi dengan model koperasi telah menjadi

bukti kongkrit dibutuhkan penguatan rakyat dalam bidang ekonomi. Gerakan yang selama ini dirintis ternyata relevan ketika covid-19 menjadi pandemik global, termasuk, sebagai respon terhadap ekonomi kapitalisme global yang terus menggerus sumberdaya di Indonesia.

Gerakan ini mengakui adanya gejala krisis multi dimensi akibat pandemik. KMDM ini membangun atau menciptakan pasar, yang mereka sebut sebagai Pasar Rabu Tani atau PRT. Pasar ini fokusnya mendistribusikan produk-produk pangan dari masyarakat sekitar kampus dengan target konsumen atau pelanggan tetap dari kalangan dosen-dosen di Universitas Andalas. Dampaknya juga tidak main-main, gerakan ini terbukti membantu masyarakat sekitar kampus, untuk bertahan dari pandemi dan persoalan-persoalan kemiskinan lainnya, karena dapat menampung produk dari petani di sekitar kampus.

Gerakan Koperasi ini memaksimalkan teknologi komunikasi, dan informasi. Proses pengadaan barang yang berjalan untuk menghimpun bahan pangan yang dipesan oleh konsumen melalui Aplikasi WhatsApp. Bagi konsumen yang ingin memesan barang, bahan-bahan pangan apa saja yang mau dibeli dengan praktis dapat memesan melalui Telpon Selulernya. Praktisnya tanpa peran serta pemerintah, kelompok masyarakat sekitar kampus telah dapat saling membantu tanpa batasan kelas antara petani dan dosen-dosen di sekitaran kampus Universitas Andalas. Model ini memiliki potensi untuk dapat menjangar dan memperkuat solidaritasnya bahkan melampaui teritorial sekitar Kampus.

### **Semarang: Gerakan Rakyat Bantu Rakyat**

Tepatnya di kota Semarang membuat puluhan organisasi rakyat memelopori Koalisi Rakyat bantu Rakyat (KOBAR) sebagai respon atas kelambatan pemerintah. Terutama setelah melihat bahwa pemerintah tidak punya navigasi yang valid untuk mengatasi covid. Gerakan ini mengakomodir sekitar 64 organisasi yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. LBH Semarang yang menjadi Sekretariat bersama beberapa kali mengeluarkan 8 (delapan) Laporan panjang dan 2 (dua) Laporan Pendek. KOBAR melihat keadaan Obyektif ini memiliki potensi krisis pangan, jika pemerintah hanya bekerja dengan kondisi lambat.

Memulai dengan menyebarkan pamflet-pamflet akan pentingnya mengantisipasi krisis pangan. Pamphlet itu disebar keseluruh Jawa Tengah dan jaringan di nasional. Melihat gejala adanya krisis nasional dan mendorong agar rakyat secara mandiri melaksanakan upaya untuk

menavigasi covid19, karena kelihatan pemerintah tidak punya navigator dalam dalam penanganan covid-19.

Koalisi bekerja dengan cara alternatif, mulai dengan pengorganisasian masyarakat alternatif, pendidikan politik alternatif. Sistem kerja dengan orang dari tiap perwakilan melaporkan setiap hari kondisi di daerahnya terus secara harian. Lalu 3 hari setelahnya merangkum semua catatan itu yang disusun dalam satu laporan besar. Koalisi ini pada akhirnya membentuk satu kelompok serikat tani kota Semarang. Serikat Tani ini menjadi inisiatif rakyat untuk mengantisipasi krisis pangan.

Keputusan untuk bertani memicu gerakan yang dalam jangka waktu tidak sampai 1 bulan sudah menyediakan 7 lahan yang disumbangkan untuk ditanami dengan luas 700 sampai 1500 M2 dan ada belasan relawan yang sudah bergabung untuk bertani. Gerakan ini telah memupuk Solidaritas lintas Kelas, dengan banyak yang berkeinginan untuk memberi donasi mulai dari donasi bibit, donasi Modal Pertanian bahkan asupan untuk buka puasa kala itu.

### **Solidaritas Pangan Jogja (SPJ)**

Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di Yogyakarta, secara kolektifitas mendorong gerakan relawan untuk Solidaritas Pangan Jogja (SPJ). Gerakan ini telah menghasilkan sekitar 12 dapur di sekitar kota Yogyakarta. Respon dari keadaan wabah saat ini, gerakan ini melihat dampak dari kebijakan PSBB yang menghasilkan kesulitan pangan bagi rakyat, terutama bagi yang pendapatan rendah dan mahasiswa yang merantau dan tidak dapat keluar dari wilayah pemukimannya.

Berbagai komunitas dan individu yang berasal dari berbagai latar belakang seperti seniman, mahasiswa dan lain sebagainya membuat gerakan ini yang selanjutnya banyak sekali yang bergabung. Dengan adanya covid-19 pemerintah terlihat acuh, petani masih memiliki harapan karena musim panen sekitar 3-4 bulan kedepan. Akan tetapi melihat kebijakan yang diberlakukan belum menavigasi kebutuhan pangan selama masa pandemik membuat rakyat menjadi sangat terancam.

Penggalangan solidaritas menyadari bahwa donasi itu tidak akan selalu muncul untuk waktu panjang, maka Solidaritas Pangan Yogya mulai berpikir mengolah beberapa lahan untuk kemudian menjadi Supporting dapur Umum. Dapur itu sudah mulai mengolah beberapa lahan, kedepannya beberapa lahan untuk ditanami sayuran, singkong dan sebagainya. Ini terinspirasi dari solidaritas Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo,



SUMBER : [HTTPS://WWW.KONDE.CO/2020/12/8288.HTML](https://www.konde.co/2020/12/8288.html)

organisasi petani lahan pesisir itu tiap kams memberi sayuran secara sukarela. Dan sayuran dari PPLP itu dapat memberi bahan untuk 12 dapur umum. Solidaritas ini memperlihatkan loyalitas kemanusiaan, ditengah menghadapi penggusuran tambang pasir besi, mereka tetap memberi untuk ketahanan pangan rakyat kecil di kota Yogya.

### **Aksi Kolektif Gerakan Rakyat Di Sumatera Utara**

Di Kota Medan, Organisasi rakyat seperti KPR-FPBI, LBH Medan, dengan SAHDAR, AJI Sumut membentuk posko bersama untuk menerima laporan-laporan kasus Covid-19. Dengan Posko pengaduan mereka berusaha merangkul kelompok rentan yang terdampak atas kebijakan di masa PSBB. Ini adalah upaya untuk membantu mereka yang sedang kesulitan dan tidak tahu mau mencari bantuan kemana. Beberapa buruh datang mengadu ke posko pengaduan di LBH. Berbagai masalah mereka muncul seperti di rumah kan oleh perusahaan, kemudian ada PHK, namun penyelesaian dalam merumahkan dan PHK juga tidak jelas, termasuk hak atas Upah, THR dan lainnya. Diluar pengaduan buruh ada juga hasil survei terkait dengan

ketahanan ekonomi, yang pada dasarnya itu kita menysar kepada buruh, petani, nelayan, juga perempuan dari responden yang di terima, rata-rata yang terdampak itu adalah pencari nafkah utamasebanyak sekitar 72%, dengan antara usia 20 sampai dengan 40 tahun. Kemudian untuk jumlah tanggungan antara 2 sampai dengan 5 orang anak.

Di beberapa titik di kota Medan, mulai muncul Gerakan atas ketidakpercayaan masyarakat kepada program-program pemerintah. Terutama atas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di beberapa titik kota Medan itu rakyat dengan sendirinya membuat dapur umum. Posko berupaya melampaui kapasitasnya dengan mulai mengumpulkan potensi untuk memenuhi kebutuhan pokok masing-masing wilayah. Untuk itu mulai melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi, terutama untuk pemenuhan Dapur umum itu agar bisa dibangun oleh masyarakat sendiri.

Ini adalah respon atas perlakuan pemerintah yang lambat, kelihatan abai melindungi rakyatnya. Ditengah pandemic, di tengah situasi krisis ini pemerintah sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menjawab persoalan-persoalan yang dialami rakyat. Gerakan ini juga di harapkan mulai membangun pemahaman atas pentingnya rakyat mengenali kekuatannya sendiri, dengan melakukan pemetaan untuk potensi ekonomi agar bisa dihubungkan satu daerah dengan daerah-daerah lain. Manakala daerah lain membutuhkan satu produk tapi daerah lain itu memilikinya sehingga masyarakat itu bisa membentuk rantai suplainya sendiri dan tidak menunggu pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan yang dialami rakyat.

### **Gerakan “Ayo Menanam”**

- **Maluku:**

Masyarakat Maluku dengan adanya covid-19 menghadapi tantangan yang serius yang pastinya akan dihadapi dengan keadaan wilayah yang terpisah-pisah oleh laut. Ketika masyarakat tidak terhubung antar pulau adalah maka akan tercipta kekurangan supply kebutuhan Subtiten. Namun Lokal Wisdom masyarakat Maluku, terutama Kota Ambon membuat mereka kemudian harus kembali ke pangan lokal dan mulai menanam.

Kondisi ini dilihat oleh komunitas Humanum agar munculnya solidaritas, dengan itu yang kemudian kampanye dan mengorganisir menggunakan taglinenya Mari Bakabong. Dalam bahasa Maluku, bakabong itu artinya berkebun. Kampanye ini untuk mendorong adanya gerakan berkebun

secara mandiri. Hasil menanam dihimbau untuk tidak di jual. Kampanye untuk mulai merencanakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk mengantisipasi tantangan kelangkaan kebutuhan pangan dari pada masyarakat di kemudian hari.

- **Padang dan Palembang:**

LBH Padang juga melakukan pemantauan dan juga mendorong upaya penanaman mandiri. Di mulai dengan mendorong tiap anggota mensosialisasikan pentingnya menanam untuk kebutuhan rumah tangga kepada rakyat. Gerakan ini agar rakyat dapat membuat wadah penanaman dalam mengantisipasi krisis pangan. Beberapa tanaman-tanaman lainnya, seperti sayur-sayuran dan sebagainya.

LBH Palembang juga membuat gerakan yang hampir sama untuk mengorganisir kegiatan tanam mandiri dalam rangka mempersiapkan ketahanan pangan, gerakan ini dipersiapkan untuk keadaan ketahanan pangan baik itu di masa covid-19 maupun paska covid-19. Upaya lebih lanjut gerakan ini mendorong penguatan komunikasi dengan teman-teman jaringan dan rakyat.

### **Komunitas Merespon Cepat Covid-19, Membangun Kesadaran Publik**

- **Nusa Tenggara Timur:**

Di Nusa Tenggara Timur mulai ada gerakan independen dengan membangun posko. Posko di bangun oleh kelompok masyarakat untuk menggalang bantuan dan mendistribusikan bantuan seperti masker untuk masyarakat desa, dan Sopir Ojek yang belum memiliki masker. Selain itu posko lain juga untuk mengantisipasi persebaran virus dengan membuat Portal untuk pembatasan pergerakan masyarakat dari desa ke luar dan dari luar masuk ke desa, termasuk juga penyiapan air untuk cuci tangan yang ada di pintu desa. Masyarakat tidak menunggu pemerintah, dan membuat inisiasi karena sudah melihat virus ini cukup mematikan sehingga rakyat cukup serius mengantisipasinya. Dan bahkan masyarakat bahkan sudah membatasi secara mandiri untuk ritual ibadah di rumah masing-masing, seperti perayaan paskah.

- **Sulawesi Selatan:**

Di Sulawesi selatan, berbagai aktifitas dilakukan, oleh BPD KPR yang menjadi salah satu komunitas yang mendorong solidaritas di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk membantu sesama rakyat mereka merancang solidaritas seperti yang pertama yaitu mengumpulkan gallon-galon air, untuk diberikan ke warga untuk cuci tangan. Kedua



SUMBER : Keith Negley - NYTIMES.COM

melakukan sebuah edukasi soal hak dari posisi rakyat kaum miskin kota yang tersebar di beberapa titik, terutama hakatas perlindungan social agar basis mengerti atas hak social mereka dari pemerintah. Karena bantuan dari pemerintah yang diharapkan untuk bisa menopang kebutuhan hidup tidak kunjung datang, dan rakyat banyak yang tidak mengetahui informasi atas hak bantuan itu.

Dari semua cerita rakyat bantu rakyat di atas, banyak yang tetap bertahan sampai detik ini terutama karena terbukti pemerintah masih gagap untuk menanggulangi covid-19. Ratusan ribu orang yang sudah terpapar virus ini dan membuat banyak masalah.Sedangkan pemerintah masih saja membuat kebijakan dengan paradigma ekonomi.Keterpurukan ekonomi global dianggap sebagai peluang untuk menggenjot aktifitas ekonomi, sedangkan rakyat masih banyak yang terlantar bahkan kehilangan jiwanya karena tidak jelasnya upaya penanggulangan Covid-19 ini.Rakyat masih gelisah dan terus memperbaiki model solidaritas mereka.Dan ini yang menjadi modal bagi rakyat untuk mengantisipasi pembajakan akses sumberdaya dari kekuatan rakyat.Yang menentukan hari-hari esok adalah rakyat yang menentukan kedaulatannya sendiri.





SUMBER: LIPUTANG.COM - JOHAN TALLO

BAGIAN - VII

## CERITA DARI PELOSOK NEGERI: "PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID19 & PEMULIHAN EKONOMI DI MASYARAKAT"

TERBIT:  
September 1, 2020

PENULIS:  
Roy Silalahi

Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi semua dimensi kehidupan masyarakat, khususnya ketika Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Segala aktivitas ekonomi terhenti. Banyak pekerja atau buruh di-PHK, dirumahkan tanpa status yang jelas. Petani merugi karena hasil panennya tidak bisa didistribusikan dengan baik dan benar. Hasil panen banyak yang turun harga, bahkan tak sedikit terbuang percuma. Pendidikan pun terdampak, dengan adanya kebijakan PSBB dan aturan untuk bekerja dan belajar dari rumah.

Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada bulan Maret 2020, yang harapannya gugus tugas ini dapat melakukan penanganan yang optimal dalam pandemi Covid-19 ini, termasuk memberikan solusi perbaikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Berbagai program bantuan dari pemerintah dikururkan untuk mengatasi

persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat ditengah pandemic khususnya ketika PSBB diterapkan.

Bantuan yang disiapkan oleh Pemerintah tidak hanya dalam rangka penanganan covid19, tetapi juga dalam rangka menghadapi krisis ekonomi yang semakin dalam akibat pandemic ini. Per Juni 2020 Pemerintah mulai mencabut status PSBB dan menerapkan kondisi New Normal dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan membentuk Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah telah menyiapkan penambahan dana stimulus untuk hal tersebut, dan insentif sosial dialokasikan sebanyak Rp.110 Triliyun. Walaupun angka ini terlihat lebih kecil dibandingkan dengan angka stimulus yang disiapkan untuk dunia industri, yakni sebesar Rp. 220 Triliyun.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah tersebut diatas, Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) telah melakukan seri webinar dengan berbagai kelompok masyarakat dari 17 Provinsi di Indonesia untuk mendengar persoalan yang muncul dari penerapan kebijakan bantuan sosial Pemerintah baik dalam rangka penanganan covid19 maupun pemulihan ekonomi. Tulisan ini merupakan rangkuman cerita yang terangkat dalam seri diskusi Suara Dari Pelosok Negeri yang diadakan oleh IGJ dan KPR pada Mei-Juni 2020 yang lalu mengenai situasi yang terjadi masyarakat dimasa pandemi.

### **Bantuan Sembako**

Dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah memberikan beberapa bentuk bantuan sosial, salah satunya berupa paket sembako yang dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret. Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga. Jumlah besarnya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggarannya Rp 1 triliun rupiah. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta.

Terkait data yang mendapatkan bantuan sosial tersebut masih banyak masyarakat yang mengeluhkan belum mendapatkannya sampai hari ini, padahal program tersebut sudah dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Masa sulit masyarakat karena terdampak pandemi, membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Pasalnya banyak dari masyarakat yang seharusnya terdata untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah malahan mendapatkan bantuan dari sesama masyarakat lain yang berinisiatif untuk bergerak membantu dengan gerakan rakyat bantu rakyat. Dan itu terjadi di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Semarang yang diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, dengan membuat dapur umum dan juga bersolidaritas membagikan bibit, pupuk dan lain sebagainya kepada para petani terdampak Covid-19.



SUMBER: ANTARA - INDRianto EKO SUWARSO

### Bantuan Sosial Tunai

Sama halnya dengan bantuan sembako, program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga dikururkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan

terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by name by address), NIK dan nomor handphone.

Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda.

Cerita dari pelosok negeri membagikan pengalaman di masing-masing



SUMBER : DOK.SINDONEWS/YUSWANTORO

wilayah, kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata tidak semudah aturan pemerintah yang diberlakukan untuk mengakses bansos yang ada. Yang terjadi dilapangan sangat berbeda dengan apa yang selalu disuarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Banyak keluhan yang berasal dari masyarakat, terkait data dan proses penyaluran bantuan sosial selama pandemi ini mengalami kecewa, kebingungan, dimana semua aparatur negara, instansi negara, sampai ke level desa turut serta mengatur proses penyaluran bansos tersebut dan itulah yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Suara siapa yang harus didengarkan. Masing-masing memberikan informasi yang kurang jelas sedangkan data masyarakat sendiri tidak terekam sebagaimana mestinya. Siapa yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial. Berapa kepala keluarga (KK) yang semestinya mendapatkan bantuan tersebut, tidak tercatat dengan baik. Banyak data dan informasi menjadi simpang siur dikalangan masyarakat dengan adanya aturan serta kebijakan yang tidak sama, yang beredar dan didapatkan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Jawa Barat dan Banten, khususnya Indramayu, dimana mereka sangat kebingungan dengan data yang setiap hari berubah-ubah terkait data penerima bansos.

Lain halnya dengan apa terjadi di beberapa wilayah lain. Cerita yang didapat dari Jawa Timur khususnya Blitar, Kepala desa sampai kewalahan dalam menangani proses distribusi bantuan mulai dari pendataan hingga

verifikasi penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Program dijalankan dengan mem-verifikasi penerima bantuan, baik Bantuan Langsung Tunai Kemensos, Dana Desa, maupun Jaring pengaman Sosial yg bekerja sama dgn Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Persoalan data ganda karena tidak baiknya sistem pendataan pun terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Seperti di wilayah lain, Nusa Tenggara pun mendapatkan bantuan langsung tunai Kemensos yang disalurkan melalui kantor Pos setempat, dan bantuan lainnya didistribusikan oleh pemerintah setempat. Bantuan sosial yang diharapkan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Barat tidak seluruhnya menasar dengan adil dan merata, banyak data penerima ganda sehingga pemerintah desa harus mendata ulang siapa saja penerima bantuan yang sesungguhnya layak diberikan bantuan. Belum lagi bantuan yang datangnya terlambat terkait proses distribusi juga banyak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Sumatera Selatan bercerita bahwa bansos saat pandemi sangat tidak kontekstual, tidak kondusif. Data-data yang dipakai sebagai penerima adalah data lama. Penerima bansos tidak tepat sasaran, orang kaya yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah mendapatkan dan orang miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan disini terjadi sebaliknya, tidak mendapatkan bantuan. Tidak kontekstual diartikan bahwa bansos ini hanya untuk menahan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak bekerja di luar rumah.

Pemerintah daerah Bali yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menggantinya dengan pembatasan kegiatan masyarakat dengan dasar hukum yang tidak jelas. Masyarakat hanya sebatas dihimbau oleh pemerintah daerah untuk disiplin dan tidak keluar rumah selama waktu yang ditentukan dalam masa pandemi. Melemahnya sektor ekonomi menjadi masalah utama dimasyarakat. Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah apalagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan karena terdampak pandemi. Di Bali korban PHK dan karyawan yg di rumahkan tidak mendapat bantuan sama sekali.

### **BLT Dana Desa**

Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Per bulannya, masing-masing keluarga

penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000, namun pada gelombang kedua jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya. Dari pelosok Kalimantan dan Maluku banya yang berpikir bahwa, pemberian BLT ini hanya membuat masyarakat ketergantungan. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan bantuan lebih dari itu, dimana kedepan mereka bisa memiliki keberlanjutan hidup sehari-hari. Seperti tanah misalnya, yang bisa membuat mereka berproduksi untuk membantu ketahanan pangan mereka.

Persoalan data terjadi tak terkecuali di Lampung dan juga Medan. Data yang tidak transparan, kesenjangan sosial terjadi disana. Siapa yang layak menerima bantuan tidak jelas. Aturan dan kriteria-kriteria yang menurut masyarakat tidak masuk akal diberikan oleh pemerintah daerah sampai ke desa-desa. Seperti mereka yang sudah mendapatkan BLT, tidak dapat program keluarga harapan (PKH), atau jika sudah mendapatkan kalau sudah dapat PKH tidak dapat bantuan pangan non tunai (BNPT) dan lain sebagainya. Itu kasus yang terjadi di Garu 2, Kota Medan.



### Insentif Tarif Listrik

Insentif tarif listrik bagi pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19 juga diberikan pemerintah masa pandemi berlangsung. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri.

## Kartu Prakerja

Bantuan lainnya yang diluncurkan pemerintah adalah Kartu Prakerja yang menurut pemerintah bisa membantu karyawan yang terkena PHK yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per

bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya, untuk insentif. Masih cerita dari pelosok negeri, masyarakat mengatakan bahwa kartu prakerja ini tidaklah efektif membantu saat pandemi, karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan yang bisa langsung diakses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan adanya kartu prakerja ini, yang hanya mengucurkan dana untuk kepentingan para pebisnis digital saja. Disamping itu kartu prakerja hanya bisa meng-cover 5,6 juta sedangkan yang mendaftar sudah 8,4 juta orang, artinya banyak orang yang memang membutuhkan perlindungan pemerintah dalam arti saat ini bantuan langsung tunai sangat diharapkan oleh masyarakat. Belum lagi kesulitan-kesulitan dalam mengakses dana kartu prakerja ini.

**Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kartu Prakerja 2020**  
**Rp 10 triliun**

**MANFAAT**

- Biaya Pelatihan **Rp 3 jt - Rp 7 jt**
- Biaya Sertifikasi **Rp 0 - Rp 900 rb**
- Insentif usai pelatihan **Rp 500 rb**
- Pengisian survei **Rp 150 rb**

**Total Manfaat per peserta**  
**Rp 3,65 jt - Rp 7,65 jt (rata-rata Rp5 juta)**

**Jokowi akan menggelontorkan Rp10 triliun untuk gaji pengangguran pada 2020. Anggaran digunakan untuk melaksanakan Program Prakerja. Berikut rinciannya:**

**YANG BISA DAPAT PROGRAM**

- WNI
- Berusia 18 tahun ke atas
- Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

**CARA MENDAPATKAN PROGRAM**

- Daftar di website atau BLK
- Porses seleksi online
- Pilih lembaga pelatihan vokasi di website atau aplikasi
- Mengikuti pelatihan
- Mendapatkan sertifikat
- Mendapatkan insentif
- Memberikan rating dan ulasan

SUMBER : CNNINDONESIA/BASITH SUBASTIAN)

## BLT BPJS

Belakangan diketahui pemerintah juga memutuskan untuk mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini, dan penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini rencananya akan disalurkan secara bertahap.

## BLT UMKM

Bantuan sosial yang terakhir diumumkan oleh Jokowi pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu. Program ini adalah bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha mikro kecil berupa dan hibah atau BLT. Bantuan senilai Rp. 2,4 juta tersebut akan ditransfer melalui rekening untuk kemudian diakses oleh para pelaku usaha mikro tersebut. Rencananya bantuan itu akan dibagikan kepada 12 juta usaha mikro kecil secara bertahap. Syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut apabila para pelaku usaha mikro tersebut belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan. Pemerintah juga berharap pelaku usaha mikro kecil itu aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi setempat.

**Syarat dan Cara Daftar BLT UMKM**

**SYARAT:**

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki Usaha Mikro
4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

**CARA:**

1. Melengkapi data usulan:
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Nama Lengkap
  - Alamat sesuai KTP
  - Bidang usaha
  - Nomor telepon
2. Penerima akan diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk Usaha Mikro
3. Penerima tidak dipungut biaya apapun

SUMBER: DETIK.COM-M FAKHRI APRIZAL/TIM INFOGRAFIS

Kita lihat apakah kemudian bantuan sosial yang baru diluncurkan pemerintah itu optimal dalam praktek seperti harapan pada saat pemerintah berkomitmen untuk membantu memperbaiki kehidupan masyarakat terdampak Covid-19 dan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sekarang menjadi pengganti Gugus Tugas tersebut diharapkan lebih bisa menyikapi persoalan dari semua pelosok negeri untuk benar-benar memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia. cerita dari pelosok negeri menggambarkan bahwa pencatatan masyarakat kita saat ini masih buruk, data lama masih dipakai, bahkan orang mati pun datanya masih beredar. Bantuan pemerintah pun diharapkan sesuai dengan masing-masing permasalahan dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak hanya bantuan yang bisa mereka dapat untuk saat pandemi saja, tetapi juga bisa menghidupi mereka dikemudian hari. Pemerintah mesti mengevaluasi bentuk dan proses penyaluran bantuan bagi masyarakat agar semua masyarakat di seluruh pelosok negeri mendapatkan bantuan yang semestinya dengan adil dan merata.





SUMBER: DOC.IGJ

BAGIAN - VIII

## KEBIJAKAN PSBB DITERAPKAN, NEGARA ABAI PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT

TERBIT :  
September 9, 2020

PENULIS :  
Rahmat Maulana Sidik

Cerita rakyat banyak disuarakan ditengah pandemi ini. Semua cerita itu disampaikan dan dikeluhkan dalam serial diskusi suara dari pelosok negeri yang diadakan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ) bekerjasama dengan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) pada 24 April hingga 20 Mei 2020. Dalam diskusi itu, masyarakat dari berbagai wilayah banyak mengeluhkan respon pemerintah dalam menangani pandemi yang tidak memperhatikan pemenuhan hak-hak masyarakat. Khususnya, terkait kebijakan PSBB yang diterapkan Pemerintah Daerah masing-masing yang berjalan tidak sesuai dengan pemenuhan hak-hak masyarakat. Bisa dibayangkan ketika kebijakan PSBB diterapkan, masyarakat diminta untuk tetap dirumah saja. Sementara tidak ada jaminan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu bagaimana nasib mereka melewati pandemic covid19 ini.

Tentunya, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditengah pandemi covid19 ini menambah kegelisahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Banyak cerita memilukan yang disampaikan oleh saudara-saudara dari berbagai daerah dalam serial diskusi suara dari pelosok negeri. Termasuk keluhan soal lesunya ekonomi masyarakat

karena adanya kebijakan pembatasan sosial. Masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan normal karena ada aturan-aturan pembatasan yang sangat ketat untuk pencegahan virus corona. Sementara, pemerintah tidak cepat tanggap dalam menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat bahkan strategi pemerintah belum cukup matang dalam menghadapi pandemi covid19 ini.

### **Sulawesi Selatan : Kebijakan PSBB Merusak Rantai Ekonomi Masyarakat**

Di Sulawesi, kebijakan pembatasan sosial berdampak membuat masyarakat was-was, dikarenakan tidak bisa menjual hasil produksi pertaniannya. Seperti jagung yang biasanya dijual untuk kebutuhan pakan ternak, sekarang kesulitan untuk menjualnya. Kemudian, sapi yang biasanya dijual ke masyarakat yang akan mengadakan pesta/resepsi pernikahan kini tidak ada yang menampung sapi mereka.<sup>(15)</sup> Tentu saja, karena mengadakan pesta/resepsi pernikahan sudah dilarang sejak pandemi covid19. Sehingga, akibat dari adanya pembatasan sosial ini membuat hancur rantai ekonomi hasil pertanian dan peternakan masyarakat Sulawesi.

Mirisnya, Pemerintah di daerah Sulawesi hanya membuat seruan/himbauan kepada Kepala Desa agar mengalihkan dana desa untuk memberikan bansos kepada masyarakat. Namun, tidak jelas skema kebijakan yang digunakan bahkan tidak ada upaya konkrit untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pangan.

Selain itu, kebijakan PSBB dikeluhkan oleh Mahasiswa perantau di Sulawesi Selatan. Mereka tidak bisa pulang ke kampung mereka, dan harus tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan secara online. Dilematisnya disampaikan oleh kawan-kawan Kesatuan Perjuangan Rakyat bahwa mahasiswa kesulitan dana untuk membeli paket internet selama kuliah online berlangsung. Biaya untuk membeli kuota sangat besar ditambah dengan uang kebutuhan mereka sehari-hari (seperti: makan, minum, dll). Sementara, orang tua mereka dikampung juga kesulitan ekonomi ditengah pandemi ini. Yang dikeluhkan adalah tidak ada sedikitpun insentif kuota internet untuk mahasiswa yang diberikan oleh pihak kampus ataupun pemerintah daerah di Sulawesi.<sup>(16)</sup>

### **Sulawesi Utara : Kebijakan PSBB Tidak Diterapkan**

Kebijakan PSBB di Sulawesi Utara tidak ada. LBH Manado menyampaikan ceritanya dalam diskusi suara dari pelosok negeri bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak menerapkan PSBB karena APBD di Provinsi tidak bisa membiayai atau menanggung kebutuhan masyarakat mulai dari pemberian

15. Armin Salasa, FIAN Indonesia – Sulawesi Selatan, diskusi melalui daring “Suara Dari Pelosok Negeri” sesi Sulawesi yang diselenggarakan oleh KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Mei 2020.

16. Tenri Sompia, KPR Sulawesi Selatan, diskusi melalui daring “Suara Dari Pelosok Negeri” sesi Sulawesi yang diselenggarakan oleh KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Mei 2020.

sembako dan bantuan lainnya. Selain tidak adanya kebijakan PSBB, di Manado juga masih memperbolehkan masyarakat yang mau mudik. Namun dengan catatan harus dikarantina di kampungnya selama 14 hari.

Disamping itu, LBH Manado<sup>17</sup> membuka posko pengaduan atau konsultasi online melalui media social (facebook) LBH Manado untuk buruh/pekerja yang dirumahkan atau masyarakat yang membutuhkan pendampingan kasus ditengah pandemi covid19 ini. Setidaknya setelah mereka membuka posko pengaduan tersebut, ada 13 kasus yang sudah masuk dalam kanal pengaduan, diantaranya kasus buruh yang dirumahkan, PHK dan bahkan tidak digaji oleh perusahaan. Kemudian LBH Manado turut membantu kasus-kasus pengaduan masyarakat itu dengan meneruskan kepada Pemerintah agar menghadirkan solusi bagi masyarakat yang menghadapi masalah ditengah pandemi ini.

### **Bali : Tidak Menetapkan PSBB**

#### **Tapi Pembatasan Sosial Sangat Luar Biasa**

Berdasarkan cerita dari kawan-kawan Yayasan Manikaya Kauci,<sup>18</sup> bahwa di Bali tidak mau mengusulkan kebijakan PSBB ke Kementerian Kesehatan. Tetapi pembatasan-pembatasan aktivitas sosial-masyarakat sangat luar biasa. Sehingga, kawan-kawan Manikaya Kauci menganggap Pemerintah Provinsi Bali hingga Pemkot/Pemkab di Bali ingin masyarakatnya taat untuk tetap dirumah namun jaminan kebutuhan hidup masyarakatnya tidak mau dipenuhi. Untuk menjalankannya, Pemprov Bali menggunakan peran desa adat guna mengatur pembatasan aktivitas masyarakat. Desa Adat ini kemudian membentuk satgas covid19 bernama "gotong royong" yang diisi oleh Polisi Adat Bali untuk mengawasi segala aktivitas sosial masyarakat agar tidak berkerumun.

### **Jawa Tengah : Kebijakan PSBB Harusnya**

#### **Bisa Memberi Solusi Bagi Anjloknya Harga Komoditas Petani**

Kebijakan PSBB di Jawa Tengah tidak berjalan efektif. Walau sudah ada himbauan untuk melakukan pembatasan sosial, tetapi masyarakat masih ramai dan berkumpul seperti dalam situasi normal. Masyarakat Jawa Tengah mengalami dilematis tersendiri dari adanya kebijakan pembatasan sosial.

Dikarenakan bila mendengarkan anjuran Pemprov Jateng dengan tetap dirumah saja, maka bagaimana mereka menghidupi keluarganya. Padahal anggaran jaring pengaman sosial untuk penanganan covid19 di Jawa Tengah sebesar Rp.1,3 Triliun. Angka yang cukup fantastis bila digunakan untuk membeli hasil pertanian langsung dari petani. Sebab sejak pandemik ini, harga hasil pertanian anjlok drastis, seperti jambu biji merah di Jawa Tengah biasanya dijual ke tengkulak dengan harga Rp.5.000,- kini anjlok menjadi Rp.750,- Begitu

17. Frank Kahiking, LBH Manado, diskusi melalui daring "Suara Dari Pelosok Negeri" sesi Sulawesi yang diselenggarakan oleh KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Mei 2020.

18. I Nyoman Mardika, Yayasan Manikaya Kauci, diskusi melalui daring "Suara Dari Pelosok Negeri" sesi Sulawesi yang diselenggarakan oleh KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Mei 2020.

juga dengan harga komoditas lain yang juga turut anjlok seperti cabe, sayuran dan ikan. Yang disayangkan justru Gubernur Jawa Tengah tidak fokus untuk memberikan solusi bagi anjloknya harga komoditas petani malah sibuk mengurus polemik parkir di Pantura. Sehingga, Pemprov Jawa Tengah tidak punya navigator untuk mengatasi ancaman krisis pangan yang akan terjadi ditengah pandemi.

### **Jawa Timur : Membangun Lumbung Pangan Saat PSBB**

Sedikit berbeda dengan provinsi lain, kebijakan PSBB di Jawa Timur tetap diterapkan. Pemerintah Provinsi Jatim menyerukan kepada masyarakat agar segala aktivitas diluar rumah wajib menggunakan masker dan handsanitizer serta menghindari kerumunan dalam jumlah massa lebih dari empat orang. Tentu saja, dari adanya pembatasan sosial tersebut masyarakat mengeluhkan akses sembako yang sulit dicari di pasar umum.

Hal ini dikarenakan adanya pembatasan aktivitas jual-beli ditempat yang ramai. Kondisi ini dikeluhkan oleh masyarakat yang biasa berdagang maupun konsumen yang membeli di pasar umum. Namun, Pemerintah Provinsi Jatim melakukan inisiasi dengan membangun lumbung pangan Jatim Expo, yang didalamnya terdapat berbagai kebutuhan pokok pangan masyarakat. Jadi lumbung pangan ini dibangun sebagai stok kebutuhan pangan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Timur<sup>19</sup>. Kebijakan membuat lumbung pangan Jatim Expo juga untuk menutup akses pasar umum yang biasa digunakan masyarakat untuk belanja kebutuhan sembako, dengan pertimbangan kesehatan ditengah pandemi dibuat satu lumbung pangan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

### **Sumatera Selatan : Kebijakan PSBB Telat Diterapkan, Daya Beli Masyarakat Menurun**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status PSBB pada 7 Mei 2020 sementara sudah banyak masyarakat di Kota Palembang yang terpapar covid19. Dalam hal ini LBH Palembang sangat menyanggahkan kelambanan Pemprov dalam merespon pandemi khususnya penetapan kebijakan PSBB. Menurutnya banyak kelompok-kelompok rentan terpapar covid19 dan harus dilindungi, seperti masyarakat miskin kota. Selain itu, beliau menilai bila kebijakan pembatasan social yang diterapkan tidak memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maka, akan banyak masyarakat Sumsel yang akan jatuh ke jurang kemiskinan. Beliau sampaikan data BPS terdapat sekitar 1,6 juta masyarakat yang rentan miskin, bila tidak ada perlindungan serius dari pemerintah maka akan menambah jumlah angka masyarakat miskin setelah pandemi.

19. Disampaikan Dian Pratiwi – FIAN Indonesia dalam seri diskusi suara dari pelosok negeri sesi Jateng, Jatim dan Yogyakarta yang diadakan mulai 24 April – 20 Mei 2020.

Kebijakan pembatasan juga menurunkan daya beli masyarakat di Sumsel, karena usaha-usaha banyak ditutup termasuk banyak pekerja/buruh di PHK dan dirumahkan. Termasuk permintaan konsumen pada pedagang-pedagang juga semakin menurun. Kebijakan PSBB di Sumsel yang melibatkan sekolah-sekolah juga membawa dampak buruk bagi pelajar, selain aktivitas belajar mengajar yang terganggu juga para pelajar cenderung malas belajar di rumah.

### **Lampung : Kebijakan PSBB Dimanfaatkan Pengusaha Untuk Mengebiri Hak- Hak Pekerja**

Di Lampung, kebijakan PSBB diterapkan namun aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. Hanya beberapa aktivitas yang ditutup aksesnya sementara, seperti sekolah-sekolah diliburkan, dan masjid ditutup. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Lampung menceritakan kebijakan PSBB ini justru dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mem-PHK dan merumahkan pekerja/buruh. Dari data yang dihimpun oleh KPR per April 2020 terdapat sekitar 1.600 pekerja yang di PHK, bila digabungkan dengan pekerja yang dirumahkan maka angkanya bisa mencapai 2000-an pekerja. Selain itu, KPR menyampaikan juga kondisi kebijakan PSBB di Lampung tidak meringankan pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa yang aktivitas kampusnya dilakukan secara daring. Kuliah menggunakan daring banyak dikeluhkan mahasiswa Lampung karena memakan biaya yang tidak sedikit. Kampus juga tidak membuat aturan keringanan pembayaran UKT justru menagih pembayaran seperti dalam keadaan normal.

### **Indramayu : Hasil Pertanian Tidak Terserap Karena PSBB**

Disampaikan oleh Kepala Desa Kalensari, Indramayu dalam diskusi suara dari pelosok negeri, bahwa di Indramayu diterapkan kebijakan PSBB berbarengan dengan musim panen petani. Tetapi, beliau sampaikan petani tetap diperbolehkan keluar untuk memanen hasil dari pertanian mereka. Yang menjadi kekhawatiran para petani di Indramayu kemana harus menjual hasil pertanian mereka, karena semua akses transportasi ditutup. Kabarnya gabah tidak terserap oleh pasar. Karena kekhawatiran hasil pertanian yang tidak terserap oleh pasar, Kepala Desa Kalensari membuat kebijakan dalam skala lokal terkait strategi serapan gabah. Strategi lokal yang dibuat agar hasil pertanian seperti beras terjual dengan memasarkan kepada relawan covid19, rata-rata relawan itu membeli beras petani desa kalensari dengan harga Rp9.700.

Selain membuat kebijakan itu, hasil petani di desa ini kebanyakan yang disimpan. Di desa Kalensari ini ada sekitar 385 Kepala Keluarga (KK), jika dalam 1 KK menyimpan 2 ton gabah maka ada sekitar 1000 ton gabah petani. Bisa dibayangkan di Indramayu ada 315 Desa, ada berapa ton gabah yang disimpan

dan belum terserap. Kepala Desa Kalensari mempertanyakan peran Bulog yang katanya bisa menampung gabah petani, harusnya Bulog bisa menyerap hasil gabah petani yang tidak jelas pasarnya ditengah wabah ini. Harga gabah kering panen itu sekitar Rp3.000 sampai Rp3.800, kalau dijual ke BUMDES menerima dengan harga Rp4.300 dan ke tengkulak biasa menampung dibawah harga itu sekitar Rp4.100 bahkan ada yang Rp3.000. Gabah biasanya banyak dibeli oleh tengkulak, karena tengkulak di desa ini mempunyai alat-alat produksi seperti penggilingan padi, sehingga banyak petani yang menjual hasil gabahnya ke tengkulak. Padahal dijual dengan harga dibawah harga acuan pangan.

### **Maluku : Kebijakan PSBR Pemerintah Maluku**

#### **Tidak Menjamin Kelancaran Rantai Ekonomi dan Distribusi Masyarakat**

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) yang ditetapkan oleh Pemprov Maluku untuk membatasi aktivitas masyarakat antar pulau. Kebijakan Namun, seperti kebanyakan daerah lain, kebijakan PSBB maupun PSBR membuat para petani kesulitan memasarkan hasil pertaniannya ke pasar karena akses transportasi dan pembatasan di pasar-pasar umum. Salah satu organisasi masyarakat sipil yang bernama HUMANUM mempertanyakan kejelasan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Maluku terkait PSBR, karena kebijakan ini tidak dibarengi edukasi kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang takut berlebihan menghadapi pandemi ini, bahkan takut memasarkan hasil pertanian mereka. Alhasil, produk pertanian masyarakat menumpuk tidak tahu akan dijual kemana.<sup>(20)</sup> Ungkap organisasi HUMANUM, bahwa pemerintah boleh menghimbau orang untuk tetap dirumah, tetapi pemerintah juga harus memastikan bagaimana agar rantai ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Adapun harga jual hasil pertanian, seperti bawang, dan sayuran praktis menjadi sangat mahal tidak seperti biasanya. Persoalan distribusi juga dialami oleh nelayan, dari hasil tangkapannya bingung kemana akan didistribusikan. Apalagi nelayan yang berada di pulau-pulau kecil di Maluku, kesulitan untuk mengakses transportasi ditengah kebijakan PSBR. Organisasi HUMANUM memiliki kekhawatiran tentang bagaimana pemerintah seharusnya memastikan rantai distribusi masyarakat tidak terputus dan konsumen juga bisa mengakses kebutuhan pangannya ditengah pandemi ini.

Kebijakan PSBR membuat organisasi HUMANUM membatasi kegiatan advokasi dan pendampingan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Melainkan diubah menjadi ke personal (1 atau 2 orang). HUMANUM juga memberikan edukasi ke masyarakat dengan tagline “Mari Bakabong” yang artinya “Mari Berkebutan” untuk kebutuhan hidupnya masing-masing. Sehingga,

20. Disampaikan Vivi Marantika, HUMANUM, dalam seri diskusi suara dari pelosok negeri sesi Kalimantan dan Maluku yang diadakan mulai 24 April – 20 Mei 2020.



mereka mengkampanyekan jangan pikir untuk menjual, pikir berkebutuhan hidup masing-masing. Kegiatan edukasi ini menurut HUMANUM untuk mengantisipasi kelangkaan kebutuhan pangan di saat pandemi.

### **Kalimantan Timur : Kebijakan PSBB Tidak Diterapkan di Wilayah Oligarki Tambang**

Di Kalimantan Timur, tidak ada penetapan kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Organisasi JATAM menyoroti tidak adanya kebijakan PSBB tersebut, padahal sudah 251 orang meninggal terinfeksi covid19. Ungkap mereka penularan covid19 sudah merambah ke 3 karyawan perusahaan tambang yakni PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang baru saja kembali dari India dan Jakarta. Tidak adanya kebijakan PSBB tentu saja membuat aktivitas tambang mereka tetap berjalan. Terbukti dengan setiap saat wara-wiri kapal tongkang yang mengangkut batubara dengan muatan sekitar 45.000 sampai 50.000 ton.<sup>(21)</sup> Sehingga, JATAM meyakini tidak akan ada penerapan kebijakan PSBB di wilayah oligarki tambang, karena untuk memastikan semua aktivitas tambang mereka tetap berjalan khususnya di wilayah Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Penajem Paser Utara, sebab disitulah wilayah ATM oligarki dan para taipan tambang.

Balikpapan menjadi salah satu kota yang paling banyak penyebaran covid19, berdasarkan informasi yang didapatkan JATAM bahwa Walikota Balikpapan akan mengajukan penetapan PSBB ke Kementerian Kesehatan. Namun, mereka masih berhitung soal cukup tidaknya APBD digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar warganya sekitar 70.000 jiwa. Setelah dipertimbangkan, Walikota tidak yakin APBD akan mencukupi kebutuhan warganya. Yang

17. Disampaikan Rupang Pradarma, Jatam Kaltim, dalam serial diskusi suara dari pelosok negeri sesi Kalimantan dan Maluku yang diadakan mulai 24 April – 20 Mei 2020.

dikhawatirkan adalah seruan untuk dirumah saja oleh pemerintah tapi kebutuhan pangan masyarakat dalam keadaan krisis.

### **Sumatera Barat :**

#### **Kebijakan PSBB Yang Kontra Penegakan HAM**

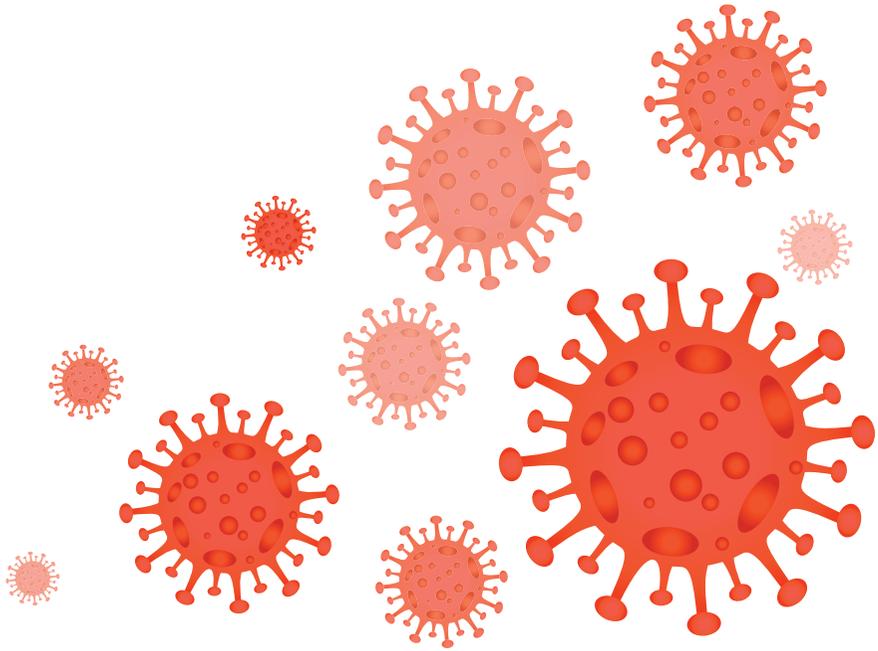
Penetapan status PSBB di Sumatera Barat sejak 22 April 2020. Kebijakan PSBB ini dibuat dengan menetapkan jam malam di beberapa Kab/Kota di Sumbar. LBH Padang mempertanyakan dasar hukum penetapan jam oleh Pemprov Sumbar. Beberapa kab/kota menerapkan jam malam kepada masyarakat yang melarang aktivitas dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. LBH Padang mengungkapkan bahwa memang dalam kebebasan social, politik ada kebebasan yang bisa dibatasi dalam keadaan tertentu. Namun, harus dengan regulasi yang jelas. Karena bila regulasinya tidak jelas dasar hukumnya maka penerapan dan prosedurnya bisa melanggar HAM.

LBH Padang mendapat laporan pengaduan ada pengamen yang dipukuli karena ia masih berkeliaran pada 22.30 malam. Namun, setelah dilaporkan ke Kepolisian tidak mendapat tanggapan serius dari laporan penganiayaan ini. LBH Padang juga menyoroti penyaluran bansos yang seharusnya disalurkan pemerintah sebelum adanya kebijakan PSBB. Sehingga, masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari pangan hingga uang. Kemudian setelah penetapan PSBB selama 20 hari belum juga bansos itu diterima oleh masyarakat.

### **Sumatera Utara : Kebijakan PSBB Berjalan Setengah Hati**

Organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara mengkritisi kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Pemprov. Kontras Sumut mengungkapkan bahwa PSBB berjalan setengah hati, kenapa dikatakan setengah hati karena satu sisi masyarakat dibatasi mobilitasnya untuk tidak keluar rumah. Disisi lain, pemerintah tidak sanggup membiayai masyarakat yang harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ungkapnya masyarakat butuh kepastian dari Pemprov, bila dirumah saja siapa yang akan menanggung kebutuhan ekonominya dan sampai kapankah mereka harus dirumah saja, sehingga kebijakan ini tidak jelas. Pemerintah di Sumatera Utara tidak mengambil kebijakan yang konkrit apakah melakukan pembatasan dirumah saja, atau dibiarkan begitu saja. Sebab, Gubernur Sumut menganggap enteng persoalan ini dengan mengatakan Sumut belum terlalu zona merah, merahnya masih merah jambu. Sehingga, kebijakan PSBB masih dijalankan setengah hati.





**INDONESIA  
FOR GLOBAL JUSTICE**

[WWW.IGJ.OR.ID](http://WWW.IGJ.OR.ID)

2021